



# KATALOG REFERENSI KELAUTAN DAN PERIKANAN



# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>2</b>
<b>KATALOG DALAM TERBITAN.....</b>	<b>4</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>5</b>
<b>Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman .....</b>	<b>6</b>
<b>Jurnal .....</b>	<b>7</b>
<b>Ringkasan Kajian .....</b>	<b>52</b>
<b>Perikanan.....</b>	<b>58</b>
<b>Artikel .....</b>	<b>59</b>
<b>Buku .....</b>	<b>61</b>
<b>Jurnal .....</b>	<b>64</b>
<b>Laporan.....</b>	<b>87</b>
<b>Ringkasan Kajian .....</b>	<b>96</b>
<b>Tata Kelola Laut dan Pesisir .....</b>	<b>102</b>
<b>Artikel .....</b>	<b>103</b>
<b>Buku .....</b>	<b>106</b>

<b>Jurnal .....</b>	<b>110</b>
<b>Laporan .....</b>	<b>159</b>
<b>Ringkasan Kajian .....</b>	<b>168</b>

## KATALOG DALAM TERBITAN

Judul Buku	: Katalog Referensi Sektor Kelautan dan Perikanan
Pengarah	: 1. Mohammad Irfan Saleh 2. Randy Rizang Wrihatnolo 3. Suhartatik 4. Retno Ambarwati 5. Suharna
Penulis	: 1. Amalia Nur Hasanah 2. Damar Nastiti Dananjaya 3. Fara Nadhifatuz Zulfa 4. Hutomo Pangestu 5. Madinar 6. Muhammad Eka Kusuma 7. Rakha Naufal Ferdiansyah 8. Titan Andriansyah 9. Very Yanto 10. Yasinta Kurnia Kusumaningrum
Desain	: Hutomo Pangestu
Penerbit	: Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Halaman	: 177
Tahun Terbit	: 2021
Ukuran	: 14,8 cm x 21 cm

## KATA PENGANTAR

Informasi dan pengetahuan merupakan aset yang sangat berharga bagi organisasi atau lembaga. Pengetahuan adalah informasi yang mengubah sesuatu atau seseorang, karena informasi menjadi dasar untuk bertindak. Mengingat pentingnya informasi dan pengetahuan, serta banyaknya informasi dan pengetahuan yang tercipta di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas yang belum dikelola dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas yang salah satu tugas dan fungsi Pusdatinrenbang adalah pengelolaan informasi dan pengetahuan. Maka dari itu kami mencoba mengumpulkan referensi baik berupa jurnal, kajian, laporan, dan sebagainya terkait sektor Kelautan dan Perikanan yang merupakan salah satu sektor di Kementerian PPN/Bappenas dan disusun sebagai katalog referensi. Katalog referensi ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi bagi unit kerja dalam membuat/menyusun kajian/laporan atau *policy paper* dan sebagainya.

Tak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim yang berkontribusi dan memberikan ide-ide - sehingga terwujudnya penyusunan katalog referensi. Tentunya katalog referensi yang kami susun, masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, kami mengharapkan masukan, kritik dan saran dalam rangka penyempurnaan katalog referensi ini

Jakarta, September 2021

Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi Renbang  
Kementerian PPN/Bappenas

Mohammad Irfan Saleh

**KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN  
POTENSI KELAUTAN DAN KEMARITIMAN**

**JURNAL**

## Analisis Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar

**Kode Klasifikasi DDC**

577.51.MUR.a

**Sektor**

Kelautan dan Perikanan

**Sub-Sektor**

Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman

**Penerbit**

Plano Madani: Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota

**Pengarang**

Murshal Manaf

**Tahun Terbit**

2015

**Tipe File**

Jurnal

**Deskripsi**

Analisis Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar adalah judul yang saya angkat dalam *paper* ini. Studi tentang pemanfaatan ruang berdasarkan potensi dan masalah di kawasan pesisir Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar. Pengembangan beberapa sektor yang merupakan potensi utama untuk dikembangkan, yaitu dari segi perikanan dan kelautan maupun pariwisata. Kajian ini meliputi pola pemanfaatan ruang. Dari hal tersebut dapat dilihat dimana yang termasuk kawasan budidaya atau nonbudidaya Kecamatan Bontoharu. Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian terapan dengan menggabungkan kualitatif dan kuantitatif.

**Analisis Pengelolaan Terumbu Karang untuk Pengembangan Ekowisata Bahari di Pulau Poncan Kota Sibolga, Sumatera Utara**  
***(Analysis of the Coral Reef Management for the Marine Ecotourism Development in Poncan Island Sibolga City North Sumatera Province)***

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	551.42.MUH.a
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia
<b>Pengarang</b>	Muhammad Riza Kurnia Lubis Santoso Rahardjo Gatot Yulianto
<b>Tahun Terbit</b>	2009
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Kota Sibolga merupakan daerah kunjungan wisata bagi masyarakat Sumatera Utara karena memiliki potensi pulau-pulau kecil dan kelautan. Potensi sumber daya hayati kelautan memiliki nilai ekologi dan ekonomi antara lain sumber daya terumbu karang dan perikanan serta wisata bahari. Pulau-pulau yang berpotensi untuk pengembangan ekowisata bahari adalah Pulau Poncan Besar dan Pulau Poncan Kecil karena memiliki potensi terumbu karang untuk wisata selam dan <i>snorkeling</i> .

***Analysis Towards the Urgency of Establishing Indonesian Marine Law to Anticipate Transnational Organized Crime***

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	364.1.ISP.a
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	Jurnal Hukum Internasional
<b>Pengarang</b>	Isplancius Ismail
<b>Tahun Terbit</b>	2013
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Indonesia adalah negara kepulauan yang secara geografis terdiri dari 70% wilayah laut dan 30% wilayah darat. Namun, tidak ada kebijakan yang mengatur mengenai kemaritiman di Indonesia maupun sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai maritim secara komprehensif sejak diratifikasinya UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1983. Kecenderungan yang terjadi adalah kebanyakan orang terfokus pada wilayah darat.

**Aspek-Aspek Kemaritiman di Dataran Rendah dan Dataran Tinggi dari Masa Mesolitik hingga Tradisi Megalitik**

*(Maritime Aspects in Lowlands and Highlands During the Mesolithic Period up to the Megalithic Period)*

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	333.9.KET.a
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	SBA: Sangkhakala Berkala Arkeologi
<b>Pengarang</b>	Ketut Wiradnyana
<b>Tahun Terbit</b>	2016
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Aspek kemaritiman di Indonesia bagian barat diketahui dari keberadaan situs-situs bukit kerang yang memiliki periode Mesolitik, dengan budaya pendukungnya Hoabinh. Situs-situs bukit kerang yang tersebar di pesisir timur Pulau Sumatera menunjukkan bahwa kawasan pantai merupakan areal yang sangat penting dalam mendukung kehidupan masa itu, mengingat berbagai biota laut menjadi objek yang di eksploitasi. Keberadaan budaya Hoabinh di dataran tinggi juga masih menunjukkan sisa-sisa aspek kemaritiman. Sebaran situs di dataran tinggi pada masa Neolitik dan Megalitik juga masih menunjukkan aspek kemaritiman.

**Dinamika Aktivitas Kemaritiman di Pulau Kumpai, Kota Cina, dan Kota Rantang, Sumatera Utara**  
*(Dynamic Activities of Maritime in Pulau Kumpai, Kota Cina, and Kota Rantang, North Sumatera)*

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	577.52.LUC.d
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	SBA: Sangkhakala Berkala Arkeologi
<b>Pengarang</b>	Lucas Partanda Koestoro Stanov Purnawibowo Repelita Wahyu Oetomo
<b>Tahun Terbit</b>	2016
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Aktivitas kemaritiman di pesisir timur Sumatera Utara tidak hanya memunculkan satu lokasi dan satu kurun waktu tertentu sebagai simpul yang berdiri sendiri. Indikasi adanya dinamika, keterkaitan, dan kesinambungan pemanfaatan pesisir timur Sumatera Utara dalam aktivitas kemaritiman dan interaksi antar bangsa dan budaya yang terjadi di masa lalu cukup besar. Penelitian arkeologis yang cukup intensif telah dilakukan di situs-situs Pulau Kumpai, Kota Cina, dan Kota Rantang beberapa waktu berselang menghasilkan data yang cukup menarik.

**Diversifikasi Pekerjaan sebagai Strategi Penghidupan Masyarakat Pesisir di Kelurahan Greges, Kota Surabaya serta Desa Puger Wetan dan Puger Kulon, Kabupaten Jember**

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	305.9.VIT.d
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	Jurnal Bumi Indonesia
<b>Pengarang</b>	Vita Yanuar Ratna Putri Alia Fajarwati
<b>Tahun Terbit</b>	2014
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Diversifikasi pekerjaan merupakan strategi penghidupan dengan bertumpu pada lebih dari satu sumber pendapatan yang dipengaruhi faktor internal (karakteristik sumber daya pesisir), dan eksternal (kebijakan pengembangan wilayahnya). Penelitian ini mengambil dua lokasi dengan perbedaan potensi tingkat kerentanan. Kelurahan Greges merupakan kawasan pengembangan kota hadap air. Desa Puger Wetan dan Puger Kulon sebagai pengembangan kawasan agropolitan.

## Efektivitas Kebijakan Moratorium Kapal Eks-Asing terhadap Tindak *Illegal Fishing* di Perairan Indonesia Periode 2014-2015

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	364.6.SON.e
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	Journal of International Relations
<b>Pengarang</b>	Sonta Purnama Ingrid Magdalena Sianturi
<b>Tahun Terbit</b>	2016
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	<p>Kegiatan <i>illegal fishing</i> di Indonesia semakin meningkat dan merugikan negara di banyak aspek seperti ekonomi, lingkungan, kesejahteraan sosial, hingga kedaulatan negara. Oleh karena itu, Indonesia telah menyusun banyak peraturan terkait <i>illegal fishing</i>, namun dikarenakan seringnya terjadi <i>illegal fishing</i> di perairan Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti, melaksanakan kebijakan moratorium kapal eks-asing seperti yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo kepada Indonesia yakni menjadi poros maritim dunia. Moratorium kapal eks-asing adalah pemberhentian izin sementara untuk kapal di atas 30 GT yang diproduksi di luar negeri.</p>

**Evaluasi Dampak Kebijakan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Sekitar (Studi Kasus pada PPP Tamperan Kab. Pacitan)**

***(Policies Impact Evaluation of Development of Tamperan Coastal Fishery Ports (PPP) against Social Change around the Coastal Economy (Case Studies in Kab. Pacitan, Tamperan PPP))***

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	387.1.MIZ.e
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	Jurnal Administrasi Publik (JAP)
<b>Pengarang</b>	Mizhar Anton S Mardiyono Wima Yudho Prasetya
<b>Tahun Terbit</b>	2014
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Indonesia sebagai negara maritim mempunyai wilayah laut seluas lebih dari 3,5 juta km <sup>2</sup> , yang merupakan dua kali luas wilayah daratan. Perairan yang sangat luas tersebut mempunyai potensi sumber daya ikan yang besar. Untuk menggali potensi tersebut diperlukan pelabuhan sebagai tempat berlabuh kapal, pendaratan ikan, memperlancar operasi penangkapan, dan pemasaran.

## Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batangan Pati dalam Usaha Perikanan

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	627.2.ENG.f
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	Diponegoro Law Review
<b>Pengarang</b>	Enggar Ahmadi Sistian Amiek Soemarmi Indarja
<b>Tahun Terbit</b>	2016
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batangan Pati mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan dilihat dari jumlah kapal, nelayan, hasil perikanan, masyarakat sekitar dan akses yang memadai. Pemerintah Kabupaten Pati mempunyai potensi bahari yang sangat signifikan, maka pembangunan Pati perlu memperhitungkan potensi itu. Pengembangan perikanan laut ini ditempuh melalui beberapa aspek seperti peningkatan sumber daya manusia yang bergerak di sektor perikanan.

## Implementasi Kebijakan Pelarangan Alat Tangkap Cantrang di Kabupaten Rembang

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	639.1.MFA.i
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	Journal of Public Policy and Management Review
<b>Pengarang</b>	M. Faizal Reza Pahlefi Zainal Hidayat
<b>Tahun Terbit</b>	2017
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Implementasi kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang berpedoman pada Perda Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015. Meningkatnya kegiatan perikanan yang tidak ramah lingkungan dan merosotnya sumber daya perikanan nasional menjadi latar belakang dari kebijakan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang dan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

**Implementasi Program Desa Pesisir Tangguh di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluk Naga  
(Coastal Village Program Implementation in Tanjung Pasir Village Teluk Naga)**

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	307.72.LEO.i
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	POLITIK: Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan
<b>Pengarang</b>	Leo Agustino
<b>Tahun Terbit</b>	2017
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Program Desa Pesisir Tangguh (PDPT) merupakan bagian dari program nasional kelautan dan para nelayan. Ditemukan beberapa masalah di Desa Pesisir Tangguh di Desa Tanjung Pasir, Tangerang yakni kawasan nelayan dan petugas maritim yang kekurangan persiapan, kurangnya representasi dalam perencanaan, program nasional untuk menguasai masyarakat yang tidak maksimal, daerah kelautan Tangerang juga nelayannya yang lemah akan pengawasan, kurang aktifnya pemerintah daerah, serta lemahnya sosialisasi program. Tujuan riset ini ialah untuk mencari tahu bagaimana implementasi program desa pesisir tangguh di Tanjung Pasir. Teori yang digunakan ialah kebijakan implementasi umum menurut George C. Edward III.

## Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya bagi Indonesia

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	623.88.MAK.k
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
<b>Pengarang</b>	Makmur Keliat
<b>Tahun Terbit</b>	2009
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Selama dekade terakhir konsep keamanan maritim telah dibahas di banyak forum global dan regional seperti PBB dan ASEAN. Namun kesepakatan bersama tentang konsep keamanan laut belum tercapai. Di antara perdebatan panjang itu adalah terkait pendekatan tradisional dan non-tradisional. Perkembangan terkini menunjukkan akomodasi yang lebih terhadap pendekatan non-tradisional. Bagi Indonesia, perkembangan ini telah meningkatkan kebutuhan akan kebijakan keamanan maritim terpadu.

## Keanekaragaman Hayati di Kawasan Pantai Kota Ambon dan Konsekuensi untuk Pengembangan Pariwisata Pesisir

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	577.51.DAN.k
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	Journal of Indonesian Tourism and Development Studies
<b>Pengarang</b>	Daniel Anthoni Sihasale
<b>Tahun Terbit</b>	2013
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Sebagai suatu daerah yang berada di wilayah Indonesia bagian timur, Pulau Ambon memiliki potensi alam yang banyak menawarkan keanekaragaman daya tarik wisata. Dengan kondisi biogeofisik, sosial budaya masyarakat dapat dijadikan sebagai potensi bagi pengembangan pariwisata. Sebagai ibukota provinsi, Kota Ambon memiliki pantai dan laut dengan keanekaragaman hayati yang khas, sehingga mempunyai peluang untuk dapat dijadikan sebagai objek wisata bahari termasuk potensi wisata bawah laut, maka Provinsi Ambon dikenal sebagai " <i>The Spice Island Exotic Marine Paradise</i> ".

## Kebijakan Deregulasi Debirokratisasi Regulasi Ekonomi Kemaritiman sebagai Katalisator Nawacita Indonesia Poros Maritim Dunia

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	343.07.RAD.k
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	Jurnal Gema Keadilan
<b>Pengarang</b>	Radityo Muhammad Harseno
<b>Tahun Terbit</b>	2017
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan ( <i>archipelagic state</i> ) terbesar di dunia yang dianugerahi dengan berbagai macam potensi kemaritiman di dalamnya. Sejak pasca-reformasi tepatnya pada pemerintahan Jokowi-JK paradigma pembangunan ekonomi nasional mulai berubah yang semula bertumpu pada daratan semata ( <i>land based economy</i> ), kini beralih ke arah ekonomi kemaritiman ( <i>maritime based economy</i> ).

## Kebijakan Ghana Melakukan Eksploitasi Minyak Sepihak kepada Pantai Gading di Teluk Guinea

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	622.1.MFA.k
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	JOM FISIP
<b>Pengarang</b>	M. Fathur Rahman Elka Putra
<b>Tahun Terbit</b>	2016
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Kegiatan sepihak yang dilakukan oleh Ghana telah memberikan dampak terhadap hubungannya dengan Pantai Gading. Pantai Gading sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Ghana memiliki perhatian terhadap perluasan eksplorasi dan eksploitasi industri perminyakan Ghana di wilayah yang disengketakan. Ghana dan Pantai Gading memiliki pantai yang berdekatan di Teluk Guinea. Para pihak memiliki posisi yang saling bertentangan atas penetapan batas laut yang menyebabkan adanya sengketa wilayah di Teluk Guinea. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kebijakan asing Ghana di wilayah yang disengketakan.

## Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Kemaritiman (Studi pada Kabupaten Kepulauan Anambas)

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	577.52.ARF.k
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelengkapan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
<b>Pengarang</b>	Arfandi Oksep Adhayanto
<b>Tahun Terbit</b>	2017
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Sebagai negara, Indonesia terdiri atas daerah-daerah maritim yang salah satunya Kepulauan Anambas. Sebagai daerah maritim Anambas memiliki limpahan sumber daya alam pariwisata berbasis kemaritiman dengan didukung letak strategis yang berada pada jalur pengembangan <i>New Regional Cruise Corridors</i> dari Singapura-Manila-Hongkong. Kondisi geografis dengan dukungan letak yang strategis menempatkan peran pariwisata sebagai lokomotif pembangunan ekonomi daerah Kepulauan Anambas.

## Kewenangan Pemerintah terhadap Keselamatan dan Keamanan Perairan Indonesia

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	623.88.MIR.k
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	Jurnal Hukum Samudra Keadilan
<b>Pengarang</b>	Mirja Fauzul Hamdi
<b>Tahun Terbit</b>	2016
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Sebagai negara maritim, Indonesia mempunyai luas laut yang besar. Atas dasar tersebut maka seyogyanya diatur dalam kebijakan nasional yaitu UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Tujuan dari pengesahan undang-undang tersebut yaitu memberikan perlindungan dan keselamatan bagi kapal dan transportasi laut sejenisnya. Dalam undang-undang tersebut pula diatur tentang tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan keselamatan serta keamanan perairan di Indonesia. Tulisan ini ingin mengkaji kewenangan pemerintah atas keselamatan dan keamanan perairan menurut undang-undang dan faktor penghambatnya.

## Konsep Pengembangan Kawasan Wisata Pelabuhan Sunda Kelapa sebagai Pusat Museum Maritim Indonesia

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	627.3.ZAH.k
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	Jurnal Planesa
<b>Pengarang</b>	Zahrotunissa Insani
<b>Tahun Terbit</b>	2015
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Indonesia merupakan negara maritim atau kepulauan terbesar di dunia. Sejak zaman bahari, pelayaran dan perdagangan antar pulau sudah berkembang dengan menggunakan berbagai macam jenis perahu dan kapal tradisional. Pelabuhan Sunda Kelapa adalah salah satu peninggalan sejarah yang berkaitan dengan kemaritiman. Saat itu merupakan pintu masuk perdagangan di Pulau Jawa yang dikenal sebagai pelabuhan lada yang sibuk. Kapal-kapal asing sudah berlabuh di pelabuhan ini membawa barang-barang. Kini Pelabuhan Sunda Kelapa berfungsi sebagai pelabuhan pelayaran rakyat dan kawasan wisata.

## Mekanisme Komunikasi Data *Gateway* Multi-Terminal Jaringan *Wireless Ad Hoc* untuk Pengembangan Komunikasi dan Navigasi Kapal Nelayan

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	623.89.AHM.m
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF)
<b>Pengarang</b>	Ahmad Fuad Achmad Affandi
<b>Tahun Terbit</b>	2012
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Kebutuhan sarana komunikasi dan navigasi yang memadai untuk menggali potensi perikanan dan kelautan wilayah perairan Indonesia sangat besar. Ketersediaan teknologi untuk mencari daerah potensi penangkapan ikan melalui berbagai media informasi yang tersedia saat ini masih memiliki keterbatasan akses teknologi, biaya mahal serta kerumitan layanan sehingga jarang digunakan khususnya oleh kapal-kapal nelayan tradisional. Suatu sistem komunikasi dan navigasi alternatif bagi kapal nelayan tradisional diharapkan dapat menjawab permasalahan di atas.

## Membangun Poros Maritim Melalui Pelabuhan

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	623.6.LAT.m
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	Masyarakat Indonesia
<b>Pengarang</b>	Latif Adam Inne Dwiastuti
<b>Tahun Terbit</b>	2015
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Tulisan ini menganalisis peran dan kinerja pelabuhan di Indonesia sebagai determinan penting dalam mendukung visi Indonesia menjadi negara maritim yang kuat. Pelabuhan memegang peranan penting untuk mendukung konektivitas dan peningkatan daya saing perekonomian Indonesia. Kinerja pelabuhan akan memengaruhi efisiensi dalam proses produksi dan distribusi.

## Menegosiasikan Batas Wilayah Maritim Indonesia dalam Bingkai Negara Kepulauan

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	341.4.SAN.m
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	Masyarakat Indonesia
<b>Pengarang</b>	Sandy Nur Ikfal Raharjo
<b>Tahun Terbit</b>	2015
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Sebagai sebuah wilayah kepulauan, isu kemaritiman selalu mendapat tempat dalam berbagai forum diskusi di Indonesia, baik dalam ranah akademisi maupun panggung politik. Pada era Orde Lama, muncul Deklarasi Juanda 1957 yang menyatakan bahwa perairan di sekitar Nusantara dan yang menghubungkan pulau-pulau tersebut menjadi bagian kedaulatan negara Republik Indonesia. Pada era Orde Baru, Indonesia berhasil memperjuangkan konsep negara kepulauan ( <i>archipelagic state</i> ) untuk diakui di dalam <i>United Nations Convention on The Law of the Sea</i> (UNCLOS) tahun 1982.

## Motivasi Australia Menerapkan Kebijakan Sekuritisasi terhadap *Irregular Maritime Arrivals* (IMA) Tahun 2001-2008

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	341.4.ELY.m
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	JOM FISIP
<b>Pengarang</b>	Elya Tanzila
<b>Tahun Terbit</b>	2015
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Penelitian ini menjelaskan tentang motif Australia menerapkan kebijakan sekuritisasi terhadap <i>Irregular Maritime Arrivals</i> . Selama bertahun-tahun, jumlah <i>Irregular Maritime Arrivals</i> telah telah meningkat di Australia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan Australia menerapkan kebijakan tersebut untuk melawan <i>Irregular Maritime Arrivals</i> yang dikenal sebagai <i>Pacific Solution</i> . Penelitian ini secara teoritis dibangun dengan perspektif neo-realisme tentang hubungan internasional dan didukung oleh teori sekuritisasi, dan juga konsep keamanan non-tradisional. Rumusan seluruh argumentasi, fakta, dan kerangka teori dalam penelitian ini dipandu oleh metode penjelasan kualitatif.

## Pelaksanaan Fungsi Perbankan dalam Penyaluran Kredit di Sektor Kemaritiman

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	332.1.MAR.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	Jurnal Selat
<b>Pengarang</b>	Marnia Rani
<b>Tahun Terbit</b>	2015
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	<p>Indonesia merupakan negara maritim dengan luas lautan kira-kira dua pertiga dari total luas wilayah kepulauan. Begitu juga dengan Provinsi Kepulauan Riau yang wilayahnya dikelilingi oleh lautan. Dengan kondisi demografi penduduk di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Tanjungpinang, sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Untuk mendukung standar hidup nelayan yang masih jauh dari sejahtera, diperlukan pendanaan dari berbagai pihak terutama bank yang mempunyai fungsi penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Diharapkan dengan fungsinya, bank dapat memberikan akses seluas-luasnya bagi nelayan terhadap pengembangan ekonomi maritim yang berpusat pada nelayan dapat terwujud.</p>

## Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Otonomi Daerah di Kabupaten Pemalang

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	352.14.LUC.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	Diponegoro Law Review
<b>Pengarang</b>	Lucky Cakra Ryandi Amiek Soemarmi Untung Dwi Hananto
<b>Tahun Terbit</b>	2016
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dan wewenang dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang serta kendala-kendala yang di hadapi saat pelaksanaan otonomi daerah. Tugas dan wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pemanfaatan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi dalam Pembangunan Sektor Kelautan serta Pengembangan Sistem Pertahanan Negara Maritim

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	658.4038.SAK.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	Geo Edukasi
<b>Pengarang</b>	Sakinah Fathrunnadi Shalihati
<b>Tahun Terbit</b>	2014
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Negara Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia. Memiliki wilayah yang didominasi oleh perairan berupa <i>ocean</i> (laut), jangkauan wilayah pesisir Indonesia yang luas tentu memiliki tantangan tersendiri dalam pembangunan dan pertahanan. Dibutuhkan waktu yang tidak singkat dan tenaga yang tidak sedikit untuk mengetahui potensi yang ada di dalamnya. Namun hadirnya teknologi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi (SIG) telah memberikan pencerahan untuk kemudahan optimalisasi pembangunan sektor kelautan dan pengembangan sistem pertahanan negara maritim.

## Pembangunan Kemaritiman dan Pesisir Studi Kasus: Analisis Kebijakan Jembatan Selat Sunda Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	623.6.ALL.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	Jurnal Selat
<b>Pengarang</b>	Alim Bathoro
<b>Tahun Terbit</b>	2016
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	<p>Proses pembangunan adalah dua sisi mata uang yang sama, satu sisi adalah fisik pembangunan dan sisi lainnya adalah pembangunan manusia. Namun dalam proses pembangunannya, biasanya lebih diutamakan pembangunan fisik, dan kurang memperhatikan pembangunan manusia. Karena itu, manusia sebagai objek, bukan subjek pembangunan. Otoritas politik hanya melihat pembangunan segi manfaat ekonomi, sedangkan pembangunan dari sisi sosial politik diabaikan. Karena itu, pembangunannya bermasalah. Pembangunan maritim di wilayah pesisir dan kepulauan juga mengalami dilema yang sama.</p>

## Penataan Pengelolaan Potensi Perikanan di Kota Semarang

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	333.9.KUK.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	Diponegoro Law Journal
<b>Pengarang</b>	Kukuh Prasetyo Amiek Soemarmi Amalia Diamantina
<b>Tahun Terbit</b>	2017
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Kota Semarang memiliki potensi perikanan yang melimpah di antaranya, potensi perikanan air tawar, potensi perikanan air laut, dan perikanan budidaya. Semarang merupakan ibukota Jawa Tengah yang terletak di wilayah pesisir utara Pulau Jawa sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi di sektor perikanan, penataan dalam mengelola potensi tersebut agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

## Pengelolaan Pelabuhan Cartagena Spanyol sebagai Kerangka Optimalisasi Pelabuhan di Negeri Sendiri

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	387.1.HAD.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	Jurnal Teknologi Maritim
<b>Pengarang</b>	Hadi Prasutiyon RO Saut Gurning
<b>Tahun Terbit</b>	2018
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Dampak ekonomi dari pengembangan Pelabuhan Cartagena sangat pesat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor kelautan dengan <i>Gross Value Added</i> (GVA) dari nilai 1,1% menjadi 3,81% dan nilai 0,1% menjadi 2,11% untuk sektor tenaga kerja.

**Pengelolaan Potensi Perikanan di Pantai Pesisir Pantai Timur Surabaya (Studi Kasus di Kecamatan Sukolilo, Mulyorejo, Kenjeran, dan Bulak)**  
*(Management of Coastal Fisheries Potential in the East Coast of Surabaya (A Case Study in the District Sukolilo, Mulyorejo, Kenjeran, and Bulak))*

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	338.3.AN1.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	Agritrop: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian (Journal of Agricultural Science)
<b>Pengarang</b>	Aniek Sulestiani M. Astral
<b>Tahun Terbit</b>	2016
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Pengelolaan potensi perikanan di pantai pesisir pantai timur Surabaya (studi kasus di Kecamatan Sukolilo, Mulyorejo, Kenjeran, dan Bulak). Keberhasilan pembangunan dan pengembangan usaha perikanan dan kelautan tergantung peran serta nelayan, pemerintah dan pengusaha, peran sinergis dari ketiga komponen tersebut diharapkan lebih meningkatkan pembangunan serta berjalan sesuai lingkungan. Tujuan penelitian mengumpulkan basis data potensi perikanan dan sumber daya pendukungnya dan mengevaluasi hambatan usaha perikanan yang berkaitan dengan komoditas, fasilitas dan teknologi (teknis, sosial, dan ekonomi).

**Pengembangan Industri Pengolahan Perikanan dalam Pengembangan Ekonomi Lokal**  
***(The Development of Fisheries Industry in the Local Economic Development)***

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	338.3.SIG.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK
<b>Pengarang</b>	Sigit Riyanto Fadjar Hari Mardiansjah
<b>Tahun Terbit</b>	2018
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Kabupaten Pati merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi perikanan dan kelautan yang cukup besar. Namun hanya sekitar 52,11% dari produksi perikanan yang dilakukan pengolahan. Tujuan penelitian untuk melakukan kajian pengembangan industri pengolahan perikanan dalam pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Pati. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus-Oktober 2018 dengan menggunakan pendekatan kualitatif-kuantitatif ( <i>mix-method</i> ).

## Pengembangan Produksi Perikanan Tangkap di Wilayah Perbatasan (Kasus Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur)

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	338.3.IIN.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	Buletin PSP
<b>Pengarang</b>	lin Solihin Sugeng H. Wisudo John Haluan dkk.
<b>Tahun Terbit</b>	2011
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Potensi sumber daya alam yang dimiliki sebagian besar wilayah terluar Indonesia adalah sumber daya kelautan dan perikanan. Hal ini dapat dipahami mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dimana aspek kelautan menjadi sangat dominan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar terdapat 92 pulau terluar. Sangat memungkinkan apabila sektor perikanan dan kelautan dapat menjadi basis dan andalan pengembangan ekonomi wilayah perbatasan tersebut.

## Pengembangan Sumber Daya Kelautan dalam Industri Maritim Dunia

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	333.9.DIC.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	Jurnal Sositoteknologi
<b>Pengarang</b>	Dicky R. Munaf Retno Windari
<b>Tahun Terbit</b>	2015
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Indonesia memegang peran penting dalam industri maritim dunia. Salah satunya melalui penyediaan pelaut untuk pasar utama perekrutan kru pelaut di Eropa, Amerika Utara, dan Timur Jauh. Dalam hal kualitas, pelaut Indonesia berada di level yang sama dengan pelaut Filipina, India, Vietnam, Sri Lanka, Bangladesh, dan negara lainnya yang menyediakan pelaut karena pusat pelatihan pelaut di Indonesia sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO) yang tertulis dalam <i>Standard of Training, Certification, and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1995</i> .

## Penguatan Hubungan Politik Internasional Indonesia dalam Mewujudkan Kedaulatan Poros Maritim yang Ideal

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	327.1.CHR.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	Gema Keadilan
<b>Pengarang</b>	Chrystofer
<b>Tahun Terbit</b>	2017
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Kedaulatan maritim menjadi salah satu isu yang semakin penting dalam perumusan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Perang global melawan <i>illegal fishing</i> , kerusakan laut, dan konservasi budaya kekayaan hasil laut semakin memperoleh legitimasi dan dukungan yang luas dari dunia internasional. Keterlibatan Indonesia dalam memperkuat kebijakan maritim tentu juga harus mengedepankan kerjasama secara hukum dan politik antar negara baik melalui hubungan bilateral, regional, dan multilateral.

## Penguatan Keamanan Maritim Indonesia : Memahami Ancaman Keamanan Maritim dan Rekonstruksi Kemaritiman Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	623.88.ABD.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	Gema Keadilan
<b>Pengarang</b>	Abdurrahman Masdiana
<b>Tahun Terbit</b>	2017
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	<p>Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo mengeluarkan sebuah doktrin bahwa Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Sebagai kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi Poros Maritim Dunia. Dalam mewujudkan cita-cita sebagai Poros Maritim Dunia tidak terlepas dari ancaman keamanan maritim yang dapat mengganggu stabilitas dan pembangunan maritim. Lebih lanjut dalam kajian ini akan membahas mengenai konsep keamanan maritim secara teoritis, peluang dan ancaman Indonesia sebagai wilayah maritim, dan konstruksi kembali dunia kemaritiman Indonesia dalam menunjang cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.</p>

## Penilaian Nelayan terhadap Program Pengembangan Perikanan Tangkap *Purse Seine* di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	639.2092.ERL.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	AKULTURASI: Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan
<b>Pengarang</b>	Erlin Hudjuala Lexy K. Rarung Grace O. Tambani
<b>Tahun Terbit</b>	2017
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Bitung merupakan salah satu kawasan pengembangan perikanan di Provinsi Sulawesi Utara. Lokasi ini memiliki infrastruktur yang mendukung bongkar muat barang dari Kota Bitung dan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Aertembaga Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara dengan tujuan (1) untuk mengetahui perkembangan program pengembangan perikanan tangkap <i>purse seine</i> di daerah penelitian dan (2) untuk mengetahui penilaian nelayan terhadap program pengembangan perikanan tangkap <i>purse seine</i> .

## Peran Unsrat dalam Penelitian Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan di Sulawesi Utara Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	330.072.CAR.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	Jurnal LPPM Bidang Sains dan Teknologi
<b>Pengarang</b>	Carolus P. Paruntu Ellen J. Kumaat
<b>Tahun Terbit</b>	2015
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Penelitian ini bertujuan untuk: a) mengidentifikasi riset-riset bidang kemaritiman/kelautan yang dilakukan Unsrat sepanjang 3 (tiga) tahun terakhir (2012-2014), b) mengidentifikasi riset-riset Unsrat yang mendukung sektor-sektor prioritas pelaksanaan MEA 2015, khususnya produk industri berbasis perikanan di Sulut. Penelitian ini mengacu pada metode deskriptif dengan menggunakan studi survei. Data diperoleh melalui studi pustaka, penelusuran laman terkait, wawancara (kuesioner) dan observasi kepada informan/responden yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan analisis AHP dan deskriptif.

**Perancangan Buku Fotografi Artefak Kemaritiman di Koarmatim Surabaya**  
*(Design Books Maritime Artifacts in Koarmatim Surabaya)*

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	779.LEO.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	Jurnal DKV Adiwarna
<b>Pengarang</b>	Leo Christian Djunarko Andrian Dektisa Anang Tri Wahyudi
<b>Tahun Terbit</b>	2014
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Inti utama dari “Perancangan Buku Fotografi Artefak Kemaritiman di Koarmatim Surabaya” adalah untuk mengenalkan kepada penduduk di luar kota Surabaya dan terutama penduduk kota Surabaya bahwa buku foto ini sekaligus menjadi sarana edukasi kepada masyarakat luas yang di mana menanamkan kepada mereka untuk memiliki semangat kemaritiman. Meskipun mereka sudah mengetahui keberadaan tempat wisata di Koarmatim, tetapi belum tentu mereka telah mengetahui isi dari tempat wisata Koarmatim tersebut.

## Perwujudan Kedaulatan Laut di Aceh Berbasis Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Menurut Perspektif Hukum Laut Internasional

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	341.4.MUH.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	Jurnal Hukum Samudra Keadilan
<b>Pengarang</b>	Muhammad Heikal Daudy
<b>Tahun Terbit</b>	2015
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	<p>Perairan laut Aceh yang berada di antara Selat Malaka (pesisir timur) dan Samudera Hindia (pesisir barat menempatkan daerah ini berhadapan langsung dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan. Laut Aceh merupakan aset besar yang berperan sebagai sumber kekayaan alam, sumber energi, sumber bahan makanan, media lintas laut antar pulau, kawasan perdagangan, dan wilayah pertahanan keamanan. Diakui bahwa perhatian masyarakat Aceh terhadap potensi wilayah lautnya semakin berkembang. Kecenderungan ini dipengaruhi oleh perkembangan pembangunan yang dinamis yang mengakibatkan semakin terbatasnya potensi sumber daya di darat.</p>

## Potensi Kekayaan Alam Kelautan Mendukung Kebijakan Kemdiknas dalam Pengembangan SMK pada Era Otonomi Daerah

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	333.9.SUB.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan
<b>Pengarang</b>	Subijanto
<b>Tahun Terbit</b>	2011
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Tujuan penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) yaitu untuk menyiapkan peserta didik sebagai pekerja tingkat menengah. Di samping itu, penyelenggaraan SMK juga bertujuan memberi kesempatan kepada peserta didik yang memenuhi kemampuan dan persyaratan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi (vokasi, profesi, dan akademik). Sebaliknya, penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) bertujuan untuk memberikan kompetensi akademik kepada peserta didik ketika melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

## Problematika Penyeragaman Hukum Maritim Perdata dan Penyelarassannya ke dalam Hukum Nasional

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	347.598.AKT.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	Perspektif
<b>Pengarang</b>	Aktieva Tri Tjitrawati
<b>Tahun Terbit</b>	2010
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Berbagai problematika penyeragaman dan penyelarasan hukum maritim perdata akan mewujudkan penegasan efesiensi dan kepastian hukum dalam melakukan aktivitas kemaritiman internasional, penyeragaman hukum juga mendorong terselenggaranya keadilan dan ketertiban sebagai prinsip utama dalam hukum perdata internasional, implikasi negara yang timbul dari penyeragaman ini bagi negara peserta perjanjian internasional.

## Relevansi Kurikulum Muatan Lokal Kelautan dengan Pengembangan Potensi Kelautan di Kabupaten Natuna (Studi Deskriptif Analitis pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Natuna)

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	375.001.YIY.r
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	Jurnal Penelitian Pendidikan
<b>Pengarang</b>	Yiyin Sulistiyo Rini Deni Kurniawan
<b>Tahun Terbit</b>	2016
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Muatan lokal kelautan sebagai bentuk diversifikasi kurikulum diharapkan dapat memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap mandiri peserta didik agar dapat berperan dalam pemberdayaan dan pengembangan potensi daerah demi terwujudnya pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, kesesuaian antar komponen kurikulum harus benar-benar diperhatikan demi terlaksananya tujuan yang diharapkan. Merujuk pada hal tersebut, perlu dilakukan sebuah penelitian tentang relevansi internal kurikulum muatan lokal kelautan dengan pengembangan potensi kelautan di Kabupaten Natuna.

**Survei Kebutuhan Informasi Bidang Kemaritiman dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai**  
*(Survey of Information Necessity in Maritime Field for Empowering Coastal Community in Perbaungan Serdang Bedagai)*

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	658.4038.ALI.s
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan)
<b>Pengarang</b>	Ali Murthadha
<b>Tahun Terbit</b>	2015
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Kebutuhan informasi di bidang kemaritiman sangat dibutuhkan untuk masyarakat pesisir sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam memberikan nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat pesisir di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai pada umumnya akan mencari informasi kemaritiman bila ingin menjawab suatu pertanyaan, mencari fakta, memecahkan masalah, mengambil keputusan, memahami sesuatu dan lain sebagainya.

**Tinjauan Geologi Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 Mil Laut Sebelah Selatan Perairan Pulau Sumba**  
***(Geological Review of Indonesian Continental Shelf Beyond 200 Nm South of Sumba Island Waters)***

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	551.PRI.t
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	Jurnal Geologi Kelautan
<b>Pengarang</b>	Prijantono Astjario Imelda R. Silalahi
<b>Tahun Terbit</b>	2013
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Indonesia berkehendak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi potensi sumber daya alam di Zona Landas Kontinen di luar 200 mil laut dengan mengajukan batas landas kontinennya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i> (UNCLOS III, 1982) hingga jarak 350 mil laut.

## TNI Angkatan Laut sebagai *World Class Navy* pada Strategi Pertahanan Indonesia dalam Mewujudkan Poros Maritim Dunia

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	359.PRO.t
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	Gema Keadilan
<b>Pengarang</b>	Probo Darono Yakti
<b>Tahun Terbit</b>	2017
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Visi pemerintahan Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, menegaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bergeser dari <i>land-oriented</i> menjadi menjadi <i>sea-oriented</i> . Pertahanan dan keamanan laut menjadi sumbu utama yang ditopang dengan keberadaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL). Jauh sebelum deklarasi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, ternyata TNI-AL lebih dahulu mengeluarkan doktrin <i>World Class Navy</i> . Dalam mewujudkannya, TNI-AL harus mencapai <i>Minimum Essential Force</i> (MEF) untuk mewujudkan tentara profesional dengan dilengkapi alat utama sistem pertahanan (alutsista).

# **RINGKASAN KAJIAN**

**Analisis *Social Costs* pada Pembuangan Limbah *Tailing* PT Freeport Indonesia di Sungai Ajkwa  
(*Social Costs Analysis of Tailing Disposal PT Freeport Indonesia in Ajkwa River*)**

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	363.7288.SUC.a
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	Doctoral Dissertation, Bakrie University
<b>Pengarang</b>	Suci Amaliah Assyahra M. Amin
<b>Tahun Terbit</b>	2014
<b>Tipe File</b>	Ringkasan Kajian
<b>Deskripsi</b>	Ekstraksi sumber daya tak terbarukan tidak pernah terlepas dari masalah limbah dan dampaknya terhadap lingkungan. Pembuangan limbah <i>tailing</i> PT Freeport Indonesia di Sungai Ajkwa ( <i>Modified Ajkwa Deposition Area</i> ) tak pelak menimbulkan dampak eksternalitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis <i>social cost</i> yang ditimbulkan dari pembuangan limbah <i>tailing</i> di Sungai Ajkwa. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif berupa metode deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan sumber terkait.

## Implementasi Deklarasi Djuanda dalam Perbatasan Perairan Lautan Indonesia

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	320.12.ERN.i
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank
<b>Pengarang</b>	Ernawati
<b>Tahun Terbit</b>	2015
<b>Tipe File</b>	Ringkasan Kajian
<b>Deskripsi</b>	Melihat kondisi geografis Indonesia yang unik, banyaknya wilayah laut dibanding darat, menyadarkan pemerintah bahwa persoalan wilayah laut merupakan faktor penting bagi kedaulatan negara. Lokasi yang sangat strategis bagi Indonesia karena terletak pada jalur persilangan lalu lintas perdagangan dunia maka semakin membuat padat jalur perdagangan maritim di kawasan Asia Tenggara. Maka pada hari Jumat 13 Desember 1957 dalam RUU Laut Teritorial muncul tiga aktor penting hingga dikeluarkannya Deklarasi Djuanda, yaitu; Djuanda, Mochtar Kusumaatmadja dan Chaerul Saleh.

## **Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Melalui Pendekatan ICZM (*Integrated Coastal Zone Management*)**

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	577.51.MAR.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank
<b>Pengarang</b>	Mariana Kristiyanti
<b>Tahun Terbit</b>	2016
<b>Tipe File</b>	Ringkasan Kajian
<b>Deskripsi</b>	Wilayah pantai merupakan suatu bagian yang kaya akan potensi sumber daya pesisir, kelautan dan perikanan. Wilayah pesisir pantai juga memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagian wilayah wisata bahari. Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai, sejak dahulu juga telah menggantungkan hidupnya dari pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di sekitar pesisir pantai. Seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan masyarakat di sekitar pesisir pantai mengalami keterpurukan. Masyarakat belum dapat mengelola sumber daya pantai secara optimal.

**Peneggelaman Kapal Pelaku *Illegal Fishing* sebagai Upaya Penegakan Hukum Perikanan di Indonesia (Studi Putusan Nomor 4/PID.SUS-PRK/2014/PN TPG Pengadilan Negeri Tanjungpinang)**

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	364.6.YUS.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank
<b>Pengarang</b>	Yusuf Istanto
<b>Tahun Terbit</b>	2015
<b>Tipe File</b>	Ringkasan Kajian
<b>Deskripsi</b>	Pengakuan kepada Indonesia sebagai negara kepulauan secara otomatis memberikan hak dan kewajiban pengelolaan atas segala sumber daya alam hayati terutama perikanan yang ada baik di laut teritorial sampai dengan zona ekonomi eksklusif. Seiring semakin meningkatnya jumlah perkara tindak pidana di bidang perikanan di Kepulauan Riau khususnya di wilayah Tanjung Pinang mendorong pemerintah kemudian menerbitkan Kepres Nomor 15 Tahun 2010 pembentukan Pengadilan Perikanan di wilayah hukum pengadilan Negeri Tanjung Pinang Riau.

## Respon Australia atas Jepang Pasca Mengeluarkan Kebijakan JARPA II Tahun (2005-2011)

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	341.3.LID.r
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan dan Kemaritiman
<b>Penerbit</b>	Doctoral Dissertation, Riau University
<b>Pengarang</b>	Lidya Adristhira
<b>Tahun Terbit</b>	2013
<b>Tipe File</b>	Ringkasan Kajian
<b>Deskripsi</b>	Penelitian ini akan menjelaskan tentang respon Australia atas Jepang pasca kebijakan JARPA II pada tahun 2005-2011. Antartika adalah wilayah populasi paus terbesar. Pada tahun 2005, pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan <i>Japanese Whale Research Program under Special Permit in The Antartic</i> Tahap Kedua (JARPA II). Poin penting dari penelitian ini adalah Jepang merupakan salah satu negara yang mendukung iklan moratorium anti-perburuan paus tetapi di sisi lain Jepang mengeluarkan kebijakan <i>pro-whaling</i> melalui program <i>Scientific Whaling</i> .

**PERIKANAN**

**ARTIKEL**

## Pengaruh Kebijakan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Puger Kabupaten Jember 2001-2012

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	639.2092.ARY.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Perikanan
<b>Penerbit</b>	Artikel Ilmiah Mahasiswa
<b>Pengarang</b>	Aryni Ayu Sugiyanto Sumarjono
<b>Tahun Terbit</b>	2014
<b>Tipe File</b>	Artikel
<b>Deskripsi</b>	Kebijakan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan adalah substansi penting penentu peningkatan sektor perekonomian dan sosial masyarakat nelayan. Kebijakan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hasil-hasil kelautan dan perikanan, karena sifat lautan yang <i>open access</i> (dapat diakses khalayak umum) dan <i>res nullius</i> (hasil laut menjadi milik perseorangan sampai ditangkap) yang dapat menyebabkan keadaan laut menjadi <i>overcapacity</i> (daya tangkap lebih) dan merusak ekosistem di dalamnya. Keadaan daya tangkap lebih dapat berakibat pada berkurangnya hasil tangkapan ikan masyarakat nelayan.

**BUKU**

## Potensi, Peluang, dan Tantangan Pengembangan Perikanan Rawa di Kalimantan Selatan

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	639.31.JUN.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Perikanan
<b>Penerbit</b>	Lambung Mangkurat University Press, Banjarmasin
<b>Pengarang</b>	Junius Akbar
<b>Tahun Terbit</b>	2017
<b>Tipe File</b>	Buku
<b>Deskripsi</b>	Sejak dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, sektor perikanan bukan lagi menjadi sub-sektor dalam bidang pertanian melainkan sudah menjadi sektor tersendiri, yaitu sektor perikanan. Sektor perikanan merupakan salah satu sektor andalan pembangunan Indonesia. Dari sektor perikanan, selain untuk memenuhi kecukupan protein hewani masyarakat dalam negeri juga dapat menghasilkan devisa negara dari ekspor hasil perikanan ke luar negeri.

## Tata Kelola Kawasan Konservasi Perairan untuk Perikanan Berkelanjutan di Indonesia

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	631.7.LUK.t
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Perikanan
<b>Penerbit</b>	Seri Publikasi PKSPL-IPB
<b>Pengarang</b>	Luky Adrianto
<b>Tahun Terbit</b>	2015
<b>Tipe File</b>	Buku
<b>Deskripsi</b>	<p>Pertanyaan klasik yang sering muncul dalam konteks pengelolaan kawasan konservasi perairan (KKP) adalah apa dan bagaimana KKP dapat bermanfaat untuk perikanan khususnya perikanan skala kecil? Pertanyaan ini muncul sebagai sebuah respon dari pendekatan KKP yang seringkali dianggap meniadakan kepentingan perikanan sebagai sebuah sistem dan dinamika ekonomi masyarakat pesisir dalam sebuah ruang kontradiksi dengan kepentingan konservasi habitat dan sumber daya ikan yang menjadi tujuan KKP <i>an sich</i>.</p>

# JURNAL

## Analisis Alternatif Kebijakan Perikanan dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan di Kabupaten Konawe

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	639.2092.IND.a
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Perikanan
<b>Penerbit</b>	Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan
<b>Pengarang</b>	Indrawan Tobarasi Rahmanuddin Tomalili
<b>Tahun Terbit</b>	2019
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Penelitian ini menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan di Kabupaten Konawe dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi masyarakat setempat sehingga dapat dilakukan pemetaan untuk menganalisis alternatif kebijakan yang tepat untuk meningkatkan pendapatan nelayan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan nelayan. Data penelitian bersumber dari hasil wawancara terhadap <i>stakeholder</i> dan data sekunder dari berbagai literatur.

**Analisis Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Tangkap di Kota Manado**  
**(Policy Analysis on Fishing Community Empowerment in Manado City)**

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	639.2.DAV.a
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Perikanan
<b>Penerbit</b>	Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap
<b>Pengarang</b>	David E.B.S. Ticoalu Emir Reppie Aglus T.R Telleng
<b>Tahun Terbit</b>	2013
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Masyarakat pesisir, termasuk nelayan di Kota Manado, telah banyak menerima bantuan lewat program pemberdayaan masyarakat pesisir, tetapi hasilnya masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu, dipandang perlu mengkaji kebijakan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kota Manado. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji penerapan hukum dan perundang-undangan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Penelitian ini dikerjakan dengan metode survei pada masyarakat pesisir di Kota Manado mulai bulan November 2012 sampai Januari 2013.

**Evaluasi dan Implikasi Kebijakan Pemberantasan Kejahatan Perikanan di Indonesia 2014 - 2018**  
*(Evaluation and Its Implication of Fisheries Crimes Eradication Policy in Indonesia during 2014 - 2018)*

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	364.1.MUH.e
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Perikanan
<b>Penerbit</b>	Jurnal Akuatika Indonesia
<b>Pengarang</b>	Muhamad Karim
<b>Tahun Terbit</b>	2020
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Kejahatan perikanan telah berlangsung sejak tahun 1970-an di Indonesia. Studi ini bertujuan (i) menganalisis kebijakan pemberantasan kejahatan perikanan di Indonesia; (ii) menganalisis dampak kebijakan pemberantasan kejahatan perikanan terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan nelayan, dan (iii) memberikan rumusan rekomendasi bagi pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan menyejahterakan seluruh rakyat. Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif dengan menggunakan data-data sekunder.

**Implementasi Kebijakan Perizinan Perikanan Tangkap di Kabupaten Pemalang  
(Policy Implementation of Capture Fisheries License in Pemalang District)**

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	639.2.MUH.i
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Perikanan
<b>Penerbit</b>	Journal of Politic and Government Studies
<b>Pengarang</b>	Muhammad Arfan
<b>Tahun Terbit</b>	2017
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Sistem otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur urusan daerahnya sendiri, begitupun dengan implementasi kebijakan perizinan perikanan tangkap di Kabupaten Pemalang. Hal tersebut terkait dengan pembahasan implementasi kebijakan perizinan perikanan tangkap di Kabupaten Pemalang yang belum berjalan optimal sehingga menimbulkan masalah-masalah dalam prakteknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosesi implementasi kebijakan perizinan perikanan tangkap di Kabupaten Pemalang, menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi.

## Implementasi Pembangunan Berkelanjutan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di ZEE Indonesia

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	338.3.IDA.i
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Perikanan
<b>Penerbit</b>	Jurnal Hukum Prioris
<b>Pengarang</b>	Ida Kurnia
<b>Tahun Terbit</b>	2017
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak tanggal 16 November 1996 UNCLOS 1982 tersebut telah berlaku, yaitu setelah setahun dipenuhinya jumlah ratifikasi yang ke-60 oleh Guyana (pada tanggal 16 November 1995) dan hal ini sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam <i>Article 308</i> yang menyatakan bahwa: UNCLOS 1982 berlaku 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pendepositan piagam ratifikasi yang ke-60. Dengan demikian UNCLOS III secara resmi menjadi peraturan internasional yang mengikat.

## Integrasi Tata Kelola Kebijakan Pembangunan Kelautan Berkelanjutan

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	339.5.DIA.i
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Perikanan
<b>Penerbit</b>	Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional
<b>Pengarang</b>	Diah Apriani Atika Sari
<b>Tahun Terbit</b>	2019
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Wilayah laut Indonesia memiliki makna yang sangat penting untuk pembangunan nasional. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat potensi ekonomi kelautan mencapai Rp. 3000 triliun sementara yang baru digarap baru Rp. 291,8 triliun. Artinya, potensi nilai ekonomi kelautan belum dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal. Pembangunan kelautan harus tepat sasaran berdasarkan pada pendekatan pembangunan yang berkelanjutan agar pemanfaatan laut dapat mencapai tujuannya yaitu untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat.

## Kajian Dampak Penggunaan Cantrang sebagai Upaya Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan

**Kode Klasifikasi DDC**

639.2.VIK.k

**Sektor**

Kelautan dan Perikanan

**Sub-Sektor**

Perikanan

**Penerbit**

Jurnal Gema Keadilan

**Pengarang**

Vika Kartika

**Tahun Terbit**

2017

**Tipe File**

Jurnal

**Deskripsi**

Indonesia sebagai negara maritim memiliki kekayaan sumber daya laut yang berlimpah sehingga tidak heran melakukan eksploitasi besar-besaran demi memenuhi permintaan kebutuhan ikan. Namun sayangnya metode yang dilakukan dalam menangkap ikan masih menggunakan cara yang linier dan tradisional seperti penggunaan cantrang. Penelitian ini bertujuan untuk, pertama mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan cantrang dalam penangkapan ikan. Kedua, untuk mengetahui solusi terkini yang dapat diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kerusakan ekosistem laut yang diakibatkan dari penggunaan cantrang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif.

**Kajian Persepsi Nelayan terhadap Kebijakan Perikanan di Kota Bengkulu**  
*(The Fisherman Perception Study on Fishery Policy in Bengkulu City)*

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	639.2092.FIN.k
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Perikanan
<b>Penerbit</b>	AGRISEP
<b>Pengarang</b>	Fina Sulistiya Ningsih Irnad Indra Cahyadinata
<b>Tahun Terbit</b>	2017
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Penanganan masalah pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia telah diatur pada Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Di dalamnya telah diatur asas-asas yang digunakan sebagai landasan semua warga masyarakat maupun pemerintah Indonesia dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Sebagian besar tujuan dari asas-asas tersebut ialah untuk terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya serta masyarakat perikanan pada khususnya.

## Kebijakan Kelautan dan Perikanan dan Implikasinya terhadap Kelestarian Sumber Daya Ikan dan Ekonomi Perikanan Indonesia

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	338.3.SUH.k
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Perikanan
<b>Penerbit</b>	Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan
<b>Pengarang</b>	Suhana
<b>Tahun Terbit</b>	2015
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait penghentian sementara (moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP RI), penghentian alih muatan ( <i>transshipment</i> ), di tengah laut, larangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan ukuran tertentu, larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela ( <i>trawls</i> ) dan pukat tarik ( <i>seine nets</i> ) di WPP RI dan larangan penangkapan ikan di WPP RI 714, dalam jangka panjang sangat baik untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan di Indonesia.

**Kebijakan Pembangunan ESDM Perikanan di Era Pemerintahan Jokowi**  
*(The Policy of Human Economic Developtment of Fishing Sector in The Jokowi Government)*

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	338.3.MUH.k
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Perikanan
<b>Penerbit</b>	Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi
<b>Pengarang</b>	Muhammad Buswari Noor Kholis
<b>Tahun Terbit</b>	2017
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Dalam sebuah pemerintahan, usaha untuk menyejahterakan masyarakat merupakan tujuan utama, yang dapat dibuktikan dengan peningkatan (GNP) suatu negara. Di Indonesia pada era pemerintahan Jokowi ini merupakan titik balik bagi peningkatan (GNP), salah satu indikatornya adalah peningkatan pemasukan di bidang perikanan dan kelautan. Dalam mewujudkan peningkatan (GNP) itu tentu saja diperlukan perencanaan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengelola potensi perikanan dan kelautan di Indonesia, dengan ditunjuknya Ibu Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan Jokowi berharap terjadi perubahan yang signifikan dalam sektor tersebut.

**Kebijakan Penetapan Pelabuhan Perikanan Samudera 1 (PPS) Bitung sebagai Kawasan Inti Minapolitan**  
***(A Policy Analysis of the Determination of Bitung Ocean Fishing Port as Minapolitan Core Region in Bitung City)***

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	387.1.RAD.k
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Perikanan
<b>Penerbit</b>	Jurnal Borneo Administrator
<b>Pengarang</b>	Radityo Pramoda Armen Zulham Yesi Dewita Sari
<b>Tahun Terbit</b>	2013
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, apakah kebijakan pemerintah (Kementerian Kelautan dan Perikanan) sudah sesuai dengan menetapkan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung menjadi kawasan inti Minapolitan Kota Bitung. Analisis penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan metode <i>survey</i> , serta dipaparkan secara deskriptif. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui wawancara, <i>mail survey</i> (daftar pertanyaan tertutup), observasi lapangan, serta studi literatur.

## Kebijakan Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	333.7.RAD.k
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Perikanan
<b>Penerbit</b>	Jurnal Borneo Administrator
<b>Pengarang</b>	Radityo Pramoda Sonny Koeshendrajana
<b>Tahun Terbit</b>	2012
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Sumber daya perikanan yang tersebar di wilayah Indonesia, jika tidak dikelola secara lestari akan punah. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah membuat peraturan yang menetapkan suatu wilayah menjadi kawasan konservasi/dilindungi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan konservasi yang termuat di dalam UU No. 27/2007, PP No. 60/2007, dan UU No. 45/2009. Analisis kajian dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, melalui studi kepustakaan.

**Kebijakan Pengembangan Perikanan Berkelanjutan (Studi Kasus: Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara)**  
***(Sustainable Fisheries Development Policy (Case Study: Wakatobi District, Southeast Sulawesi Province and Morotai Island District, North Maluku Province))***

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	338.3.LUK.k
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Perikanan
<b>Penerbit</b>	Jurnal Perikanan dan Kelautan
<b>Pengarang</b>	Lukman Adam
<b>Tahun Terbit</b>	2012
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Pengembangan perikanan, termasuk akuakultur sub-sektor dan penangkapan perikanan di daerah Wakatobi dan Pulau Morotai yang berfokus pada keseimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sistem pengelolaan perikanan meliputi pengembangan perikanan dengan memperhatikan aspek keduanya. Kondisi sumber daya perikanan yang telah menurun membutuhkan pengelolaan perikanan agar tetap berkelanjutan dan memberikan hasil yang berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya perikanan harus dilakukan dengan cara yang holistik.

## **Kebijakan Pengembangan Perikanan Berkelanjutan di Indonesia (Sustainable Fisheries Development Policy in Indonesia)**

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	338.3.LUK.k
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Perikanan
<b>Penerbit</b>	Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik
<b>Pengarang</b>	Lukman Adam T. Ade Surya
<b>Tahun Terbit</b>	2013
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	<p>Pengembangan sektor perikanan hanya dapat dirumuskan secara tepat dengan memperhatikan kebutuhan pengguna sumber daya tersebut. Sektor perikanan, baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap, sangat bergantung pada kelestarian ekosistem pesisir, terutama terumbu karang dan hutan <i>mangrove</i>. Saat ini, kondisi ekosistem pesisir sangat menurun. Salah satu bentuk pelestarian ekosistem pesisir dilakukan dengan menetapkan kawasan konservasi laut di wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi.</p>

**Peluang dan Tantangan Subsektor Perikanan dalam Menopang Perekonomian Provinsi Banten  
(*The Opportunities and Challenges of Fisheries Subsector in Supporting the Economy of Banten Province*)**

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	338.3.REZ.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Perikanan
<b>Penerbit</b>	Jurnal Kebijakan Pembangunan daerah
<b>Pengarang</b>	Reza Septian Pradana
<b>Tahun Terbit</b>	2019
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peluang dan tantangan yang dihadapi oleh sub-sektor perikanan dalam menopang perekonomian Provinsi Banten melalui telaah terhadap perkembangan sub-sektor perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya dan faktor yang memengaruhinya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.

## Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Peraturan Pengelolaan Perikanan yang Berkelanjutan di Indonesia

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	348.598.DYA.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Perikanan
<b>Penerbit</b>	Justitia Et Pax: Jurnal Hukum
<b>Pengarang</b>	Dyah Ayu Widowati Rizky Septiana Widyaningtyas Agi Tiara dkk.
<b>Tahun Terbit</b>	2019
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perwujudan prinsip <i>good governance</i> dalam peraturan pengelolaan perikanan di Indonesia; menganalisis dan merumuskan model peraturan pengelolaan perikanan berkelanjutan yang sesuai dengan konsep <i>good governance</i> . Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif.

## Perencanaan Disain Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berbasis Sistem Informasi Manajemen

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	658.4038.UMA.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Perikanan
<b>Penerbit</b>	Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan (Agrikan UMMU-Ternate)
<b>Pengarang</b>	Umar Tangke
<b>Tahun Terbit</b>	2010
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Pengelolaan sumber daya perikanan harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tepat, dengan memanfaatkan data yang kontinu dan teknologi yang mampu menggambarkan wilayah, potensi sumber daya perikanan dengan baik. Integrasi penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografi (SIG) merupakan salah satu cara untuk mengelola sumber daya perikanan dengan data yang kontinu dan sebaran spasial yang bisa menampilkan secara sederhana bentuk dan potensi sumber daya perikanan.

## Perencanaan Program Pengembangan Budidaya Perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	338.3.BUR.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Perikanan
<b>Penerbit</b>	Jurnal Katalogis
<b>Pengarang</b>	Burhan Jumiaty
<b>Tahun Terbit</b>	2016
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perencanaan program pengembangan budidaya perikanan tambak di Dinas Perikanan Kabupaten Kelautan dan Mamuju Utara. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, mengukur perencanaan program berdasarkan pendapat Glen dalam Adi (2004:81) meliputi: aspek perencanaan tanggap, aspek pelibatan masyarakat dan aspek kerjasama. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

**Perikanan Tangkap di Indonesia: Potret dan Tantangan Keberlanjutannya**  
*(Capture Fisheries in Indonesia: Portraits and Challenges of Sustainability)*

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	338.3.KUS.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Perikanan
<b>Penerbit</b>	Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
<b>Pengarang</b>	Kusdiantoro Achmad Fahrudin Sugeng Hari Wisudo dkk.
<b>Tahun Terbit</b>	2019
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Perikanan tangkap di Indonesia memiliki peran strategis, namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari kompleksitasnya permasalahan yang dihadapi. Ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya ikan dan kapasitas pelaku usaha menjadi perhatian utama dalam mewujudkan perikanan tangkap berkelanjutan.

## Perlindungan Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Perspektif Otonomi Daerah

**Kode Klasifikasi DDC**

352.14.MAS.p

**Sektor**

Kelautan dan Perikanan

**Sub-Sektor**

Perikanan

**Penerbit**

Muhammadiyah Law Review

**Pengarang**

Mashuril Anwar

**Tahun Terbit**

2020

**Tipe File**

Jurnal

**Deskripsi**

Konfigurasi kebijakan perikanan sebelum era otonomi daerah menunjukkan hegemoni negara yang menganut doktrin milik bersama, sentralistik, dan anti-pluralisme hukum. Sejak era otonomi daerah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan potensi daerahnya, termasuk sumber daya perikanan. Seiring dengan pergeseran kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan tersebut, daerah diharapkan dapat berperan dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi perikanan. Namun di sisi lain, pengelolaan sumber daya perikanan sulit untuk diwujudkan tanpa adanya kebijakan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah.

**Potensi dan Peluang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap di Pantura Jawa Tengah  
(Potency and Development Opportunity of Bussines Capture Fisheries in North Coastal of Central Java)**

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	381.4.IMA.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Perikanan
<b>Penerbit</b>	Jurnal Sainstek Perikanan
<b>Pengarang</b>	Imam Triarso
<b>Tahun Terbit</b>	2013
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Potensi sumber daya perikanan tangkap di Indonesia, termasuk di Pantura Jawa Tengah terindikasi telah mengalami tangkap lebih ( <i>overfishing</i> ). Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh tekanan penangkapan yang didominasi oleh perikanan tangkap skala kecil yang banyak beroperasi di perairan pantai. Oleh sebab itu, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap di Pantura Jawa Tengah ke depan sudah saatnya dilakukan rasionalisasi dan menentukan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan armada perikanan tangkap yang mampu beroperasi di lepas pantai yang masih memberikan peluang pengembangan usaha perikanan tangkap.

**Strategi Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap Skala Kecil yang Berkelanjutan di Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh**  
***(Strategy of Productivity Improvement of Sustainable Small-Scale Capture Fisheries in Aceh Jaya, Aceh Province)***

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	338.3.TEU.s
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Perikanan
<b>Penerbit</b>	Jurnal Perikanan Tropis
<b>Pengarang</b>	Teuku Amarullah
<b>Tahun Terbit</b>	2017
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Penelitian ini membahas tentang strategi peningkatan produktivitas perikanan tangkap skala kecil yang berkelanjutan pada di Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Penelitian telah dilakukan selama 4 bulan dan dimulai pada bulan Agustus 2014 sampai dengan Desember 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas perikanan tangkap skala kecil yang berkelanjutan dan strategi untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap skala kecil yang berkelanjutan di Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Metode survei digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini menggunakan wawancara mendalam kepada responden. Analisis data menggunakan analisis regresi linier, analisis deskriptif dan analisis SWOT.

# LAPORAN

## Isu Strategis dan Program Prioritas Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2018

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	354.5.TRI.i
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Perikanan
<b>Penerbit</b>	Kementerian Kelautan dan Perikanan
<b>Pengarang</b>	Tri Hariyanto
<b>Tahun Terbit</b>	2018
<b>Tipe File</b>	Laporan
<b>Deskripsi</b>	Tantangan dan isu aktual pembangunan perikanan: (1) perubahan orientasi pembangunan nasional (pendekatan berorientasi daratan berubah menjadi pendekatan berorientasi maritim; (2) tantangan (perubahan iklim, perekonomian global dan pertumbuhan penduduk); dan (3) dampak perikanan budidaya (lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, ketahanan pangan dan PDB).

## Kebijakan Percepatan Pembangun Industri Perikanan Nasional

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	338.3.NAZ.k
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Perikanan
<b>Penerbit</b>	Transformasi: Center for Public Policy Transformation
<b>Pengarang</b>	Nazla Mariza Bambang Wicaksono Joanna Octavia
<b>Tahun Terbit</b>	2016
<b>Tipe File</b>	Laporan
<b>Deskripsi</b>	Industri perikanan nasional Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat signifikan di bawah kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sejak tahun 2014. Namun, industri tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan dari segi ekonomi maupun tata kelola, seperti tingkat produksi yang belum maksimal, ketersediaan infrastruktur yang kurang memadai, ekspor yang masih didominasi oleh bahan baku, serta tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya terintegrasi.

## Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan s.d. Agustus 2019

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	338.3.KEM.k
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Perikanan
<b>Penerbit</b>	Kementerian Kelautan dan Perikanan
<b>Pengarang</b>	Kementerian Kelautan dan Perikanan
<b>Tahun Terbit</b>	2019
<b>Tipe File</b>	Laporan
<b>Deskripsi</b>	Laju pertumbuhan PDB perikanan triwulan II-2019 sebesar 6,25% atau 29,39% lebih tinggi daripada laju pertumbuhan PDB perikanan TW I-2018 yang besarnya 4,83%. Nilai PDB Perikanan TW III-2019 juga lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018, yakni mengalami kenaikan dari Rp. 58,58 triliun pada TW II-2018 menjadi Rp. 62,24 triliun pada TW II-2019.

## Konsepsi Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya Terintegrasi; Tantangan dan Peluang

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	338.3.IKH.k
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Perikanan
<b>Penerbit</b>	Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan, Ditjen. Perikanan Budidaya KKP
<b>Pengarang</b>	Ikhsan Kamil
<b>Tahun Terbit</b>	2020
<b>Tipe File</b>	Laporan
<b>Deskripsi</b>	Latar belakang laporan ini antara lain: pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya dalam RPJMN lima tahun ke depan salah satunya adalah udang dan rumput laut; udang dan rumput laut berkontribusi signifikan dalam peningkatan ekspor produk perikanan, kebutuhan industri dan konsumsi dalam negeri; akselerasi pengembangan kawasan budidaya perikanan yang berkelanjutan; dan sinergitas <i>stakeholders</i> dalam pembangunan sektor perikanan budidaya di Indonesia.

## Pengembangan Komoditas Unggulan Strategis Perikanan Budidaya, dan Tata Kelola Perizinan untuk Memacu Investasi

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	338.3.KEM.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Perikanan
<b>Penerbit</b>	Kementerian Kelautan dan Perikanan
<b>Pengarang</b>	Kementerian Kelautan dan Perikanan
<b>Tahun Terbit</b>	2019
<b>Tipe File</b>	Laporan
<b>Deskripsi</b>	Latar belakang laporan ini yakni UU Nomor 17 Tahun 2007: RPJPN 2005 - 2025 (Visi: Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur). RPJMN ke 4 (2005 - 2025): difokuskan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Misi pembangunan perikanan budidaya: pembangunan perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan berbasis pada kepentingan nasional dan didukung oleh SDM yang berkualitas.

## Produktivitas Perikanan Indonesia

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	338.3.KEM.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Perikanan
<b>Penerbit</b>	Kementerian Kelautan dan Perikanan
<b>Pengarang</b>	Kementerian Kelautan dan Perikanan
<b>Tahun Terbit</b>	2018
<b>Tipe File</b>	Laporan
<b>Deskripsi</b>	Pertumbuhan PDB sektor perikanan selalu di atas PDB Nasional dan PDB Sektor Pertanian. Sampai dengan TW III 2017 pertumbuhan 6,79% dengan nilai PDB Sektor Perikanan Rp. 169.513,10 miliar. Sampai dengan TW IV 2017: total produksi perikanan nasional 23,26 juta ton: (1) perikanan tangkap 6,04 juta ton dan (2) perikanan budidaya 17,22 juta ton.

## Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Kabupaten Belitung Timur 2018 - 2025

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	338.3.PEM.r
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Perikanan
<b>Penerbit</b>	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
<b>Pengarang</b>	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
<b>Tahun Terbit</b>	2018
<b>Tipe File</b>	Laporan
<b>Deskripsi</b>	Laporan akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu proses dari tahapan penyelesaian pekerjaan penyusunan rencana pengembangan dan pengelolaan perikanan Kabupaten Belitung Timur, yang disusun berdasarkan kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Belitung Timur dengan Pusat Riset Perikanan, Badan Riset Sumberdaya Manusia Kelautan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

## Tren Sumber Daya Kelautan dan Pengelolaan Perikanan di Indonesia

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	338.3.DAV.t
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Perikanan
<b>Penerbit</b>	California Environmental Associates
<b>Pengarang</b>	David and Lucile Packard Foundation
<b>Tahun Terbit</b>	2018
<b>Tipe File</b>	Laporan
<b>Deskripsi</b>	Terdapat beberapa faktor ketersediaan informasi akurat dan terkini menjadi sebuah tantangan di Indonesia. Membentang di garis khatulistiwa, negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 18.000 pulau ini memiliki zona ekonomi eksklusif terbesar keenam di dunia. Lokasi terpencil yang adalah rumah bagi banyak komunitas nelayan pesisir dapat menyulitkan para pengelola di tingkat nasional dan daerah untuk mengumpulkan data dan mencatat tren yang komprehensif di tingkat komunitas lokal.

# **RINGKASAN KAJIAN**

**Dampak Kebijakan Perikanan dan Kelautan terhadap Aktivitas Nelayan Tanimbar (Studi di Desa Lermatang sebelum Beroperasinya Blok Masela)**  
*(Impact of Marine and Fishery Policies on the Activities of Tanimbar Fishers (A Study in Lermatang Village Prior to the Operation of the Masela Block))*

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	639.2092.HER.d
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Perikanan
<b>Penerbit</b>	Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan 2019 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpatti
<b>Pengarang</b>	Hermien Lola Soselisa Pieter Sammy Soselisa
<b>Tahun Terbit</b>	2019
<b>Tipe File</b>	Ringkasan Kajian
<b>Deskripsi</b>	Salah satu tujuan utama dari kebijakan dan program pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan adalah peningkatan kesejahteraan penduduk, terutama penduduk lokal yang mendiami wilayah pesisir dan terlibat dalam kegiatan perikanan berskala kecil. Walaupun demikian, tidak semua kebijakan dan program berjalan sesuai dengan tujuan. Salah satu penyebab adalah tingkat pemahaman yang terbatas terhadap masyarakat target, terutama tentang budaya yang terkait mata pencaharian di laut dan interpretasi lokal terhadap lingkungannya.

## Kajian Perencanaan Wilayah Melalui Program PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bone Bolango

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	711.8.SUP.k
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Perikanan
<b>Penerbit</b>	Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG
<b>Pengarang</b>	Supardi Nani
<b>Tahun Terbit</b>	-
<b>Tipe File</b>	Ringkasan Kajian
<b>Deskripsi</b>	Penelitian ini bertujuan menyusun kajian perencanaan pembangunan wilayah dan sumber daya kelautan berbasis desa dan dalam mensinergikan pelaksanaan program PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bone Bolango. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) wawancara terstruktur dengan menggunakan kuesioner: metode ini dimaksudkan untuk menggali informasi kepada responden terpilih mengenai keadaan masyarakat dan potensi desa dan (2) diskusi terfokus: metode ini dilakukan dengan <i>stakeholder</i> terkait membahas kemungkinan pengembangan wilayah yang ada di kecamatan dan desa sasaran, kegiatan ini dimaksudkan untuk mempertajam kajian dan pengumpulan data di lapangan.

## Kebijakan Pengelolaan Usaha Perikanan Tangkap Nelayan Skala Kecil di Pantura Jawa Tengah

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	381.4.SUH.k
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Perikanan
<b>Penerbit</b>	Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank
<b>Pengarang</b>	Suharno Tri Widayati
<b>Tahun Terbit</b>	2015
<b>Tipe File</b>	Ringkasan Kajian
<b>Deskripsi</b>	Solusi pembangunan perikanan saat ini belum dapat memecahkan berbagai permasalahan yang muncul, yaitu minimnya kesejahteraan nelayan dan indikasi hasil tangkap yang berlebih ( <i>overfishing</i> ) di Pantai Utara Jawa Tengah. Eksploitasi sumber daya ikan secara berlebih sebagai salah satu cara dalam menambah pundi-pundi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjadikan penangkapan sumber daya ikan secara tidak terkendali karena tanpa mempertimbangkan konsep <i>sustainable development</i> .

## Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan di Indonesia

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	338.3.FAI.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Perikanan
<b>Penerbit</b>	Komisi Maritim dan Kelautan PPI Dunia, PPI Brief No. 12/2020
<b>Pengarang</b>	Faisal Hamzah Karina Sujatmiko Lusita Meilana dkk.
<b>Tahun Terbit</b>	2020
<b>Tipe File</b>	Ringkasan Kajian
<b>Deskripsi</b>	Sumber daya perikanan memberikan kontribusi penting bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan nelayan. Hal ini tercermin melalui pertumbuhan produk domestik bruto perikanan relatif lebih tinggi diatas 5% dibandingkan pertumbuhan produk domestik bruto nasional. Produksi perikanan tangkap meningkat setiap kuartal tiap tahunnya dan mengalami lonjakan yang cukup signifikan 4.9 juta ton tahun 2009 menjadi 7.0 juta ton tahun 2017.

**Rencana Kebijakan Pengelolaan Perikanan Berbasis Ekosistem di Provinsi Nusa Tenggara Barat  
(Policy Based Ecosystem Fisheries Management Plan in West Nusa Tenggara Province)**

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	338.3.ASF.r
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Perikanan
<b>Penerbit</b>	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB
<b>Pengarang</b>	Asfin
<b>Tahun Terbit</b>	-
<b>Tipe File</b>	Ringkasan Kajian
<b>Deskripsi</b>	Perikanan budidaya dan perikanan tangkap dengan pemanfaatan potensi perairan laut merupakan kegiatan usaha penting dalam proses produksi untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat setempat selain sektor pertanian dan peternakan.

# **TATA KELOLA LAUT DAN PESISIR**

**ARTIKEL**

## Tata Kelola Pesisir yang Berkelanjutan

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	577.51.DAU.t
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	PERSEPSI (Koran Harian)
<b>Pengarang</b>	Daud Yusuf
<b>Tahun Terbit</b>	2020
<b>Tipe File</b>	Artikel
<b>Deskripsi</b>	Sepanjang tahun 2019 telah berlangsung pencemaran minyak di Teluk Balikpapan, pesisir Karawang dan Pulau Pari Kepulauan Seribu. Pencemaran ini problem serius dalam pengelolaan pesisir. Kasus-kasus ini memengaruhi kesehatan wilayah pesisir dan ekosistem khususnya. Utamanya, terumbu karang lamun dan <i>mangrove</i> . Ditambah lagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir yang memanfaatkannya.

## Transformasi Menuju Pembangunan Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	338.9598.ACH.t
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Indonesia Ocean Justice Initiative
<b>Pengarang</b>	Achmad Santosa Stephanie Juwana
<b>Tahun Terbit</b>	2020
<b>Tipe File</b>	Artikel
<b>Deskripsi</b>	<i>Sustainable ocean economy</i> adalah konsep pembangunan sektor kelautan yang bertujuan mewujudkan keseimbangan antara perlindungan ekosistem, pemenuhan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan, dan pembangunan ekonomi. Dengan begitu, nilai ekonomi laut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan ( <i>sustainable</i> ). Prof. Dr. Mari Elka Pangestu ( <i>Co-chair of the High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy Expert Group and Managing Director of World Bank</i> ) menyampaikan bahwa implementasi <i>sustainable ocean economy</i> akan mendatangkan “ <i>triple win</i> ” untuk manusia ( <i>people</i> ), lingkungan hidup ( <i>nature</i> ), dan ekonomi ( <i>economy</i> ).

**BUKU**

## Mendesain Pengelolaan Sumber Daya Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Efektif

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	577.51.GOM.m
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	USAID Coral Triangle Support Partnership
<b>Pengarang</b>	Gombos M. Atkinson S. Green A. dkk.
<b>Tahun Terbit</b>	2013
<b>Tipe File</b>	Buku
<b>Deskripsi</b>	Semua masyarakat ingin hidup berdampingan dengan sumber daya alam yang sehat dan melimpah, yang menyediakan banyak manfaat bagi mereka seperti, pangan, pendapatan, obat-obatan dan nilai budaya. Namun, masyarakat pesisir di seluruh dunia pada saat ini menghadapi dampak buruk terhadap sumber daya alam mereka yang berharga, akibat ancaman dari perubahan iklim dan ancaman lokal.

## Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	577.51.SUR.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Undip Press Semarang
<b>Pengarang</b>	Suryanti Supriharyono Sutrisno Anggoro
<b>Tahun Terbit</b>	2019
<b>Tipe File</b>	Buku
<b>Deskripsi</b>	Buku ini disusun secara umum dan sederhana guna memenuhi kebutuhan mahasiswa mempelajari tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu di Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Departemen Sumber Daya Akuatik, sehingga dapat mempermudah dan memperkenalkan bentuk pengelolaan di wilayah pesisir. Laut Indonesia memiliki luas kurang lebih 5,6 juta km <sup>2</sup> dengan garis pantai sepanjang 81.000 km, dengan potensi sumber daya, terutama perikanan laut yang cukup besar, baik dari segi kuantitas maupun diversitasnya.

**Rencana Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut dan Pembangunan Sumber Daya Wilayah Pesisir Desa Blongko, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara**

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	577.51.ME1.r
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	BAPPEDA Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara
<b>Pengarang</b>	Meidiarti Kasmidi Arnold Ratu Erick Armada dkk.
<b>Tahun Terbit</b>	1999
<b>Tipe File</b>	Buku
<b>Deskripsi</b>	Desa Blongko merupakan salah satu dari tiga lokasi proyek Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir ( <i>Coastal Resources Management Project</i> ) di Sulawesi Utara yang diprakarsai bersama antara United State Agency for International Development (USAID) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) sejak bulan Mei 1997. Dipilihnya Desa Blongko sebagai salah satu lokasi proyek oleh Tim Kerja Tingkat Provinsi Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir berdasarkan pada pertimbangan sebagai berikut tingkat ketergantungan masyarakat yang cukup tinggi terhadap sumber daya pesisir.

# JURNAL

## Analisis Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Kabupaten Maluku Tengah

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	338.3.ACH.a
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	OCTOPUS: Jurnal Ilmu Perikanan
<b>Pengarang</b>	Achmad Zaky Marasabessy Najamuddin
<b>Tahun Terbit</b>	2015
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Tujuan penelitian ini adalah melihat tata kelola sumber daya perikanan tangkap di Kabupaten Maluku Tengah dan mendesain kelembagaan pengelolaan sumber daya perikanan tangkap di Kabupaten Maluku Tengah.

## Analisis Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar

**Kode Klasifikasi DDC**

577.51.MUR.a

**Sektor**

Kelautan dan Perikanan

**Sub-Sektor**

Tata Kelola Laut dan Pesisir

**Penerbit**

Plano Madani: Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota

**Pengarang**

Murshal Manaf

**Tahun Terbit**

2015

**Tipe File**

Jurnal

**Deskripsi**

Analisis Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar adalah judul yang saya angkat dalam *paper* ini. Studi tentang pemanfaatan ruang berdasarkan potensi dan masalah di kawasan pesisir Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar. Pengembangan beberapa sektor yang merupakan potensi utama untuk dikembangkan, yaitu dari segi perikanan dan kelautan maupun pariwisata. Kajian ini meliputi pola pemanfaatan ruang. Dari hal tersebut dapat dilihat dimana yang termasuk kawasan budidaya atau nonbudidaya Kecamatan Bontoharu. Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian terapan dengan menggabungkan kualitatif dan kuantitatif.

**Analisis Pengelolaan Kawasan Pesisir secara Terpadu di Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara**

***(Analysis of Integrated Coastal Management in Serdang Bedagai North Sumatra)***

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	577.51.RAS.a
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	AQUACOASTMARINE
<b>Pengarang</b>	Rasyid Kurnia Nasution Darma Bakti Rusdi Leidonald
<b>Tahun Terbit</b>	2015
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Serdang Bedagai memiliki panjang garis pantai 95 km meliputi lima kabupaten yaitu Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin dan Bandar Khalifah. Daerah ini memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan pertanian, ekowisata bahari, perikanan, dan penelitian. Dari setiap potensi yang ada di pesisir Serdang Bedagai, masih terdapat beberapa permasalahan terutama rusaknya ekologi pantai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah strategis pengelolaan pesisir terpadu di Serdang Bedagai.

**Analisis Sejarah dan Pendekatan Sentralisasi dalam Pengelolaan Taman Nasional Bali Barat  
(*Historical Analysis and Centralized Approach in Management of Bali Barat National Park*)**

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	719.AMI.a
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
<b>Pengarang</b>	Amir Mahmud Arif Satria Rilus A. Kinseng
<b>Tahun Terbit</b>	2015
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Tata kelola sumber daya alam terutama kawasan konservasi masih berada di bawah kontrol pemerintah pusat, meskipun pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) juga memiliki peran/kewenangan tertentu di era desentralisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis sejarah Taman Nasional Bali Barat (TNBB) dan pengelolaannya.

## Analisis Yuridis Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Pesisir berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	341.4.TAU.a
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Jurnal Esensi Hukum
<b>Pengarang</b>	Taufiqurrahman Syahuri Euodia Octavia Sitompul
<b>Tahun Terbit</b>	2020
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah lautan meliputi hampir dua pertiga bagian dari seluruh luas wilayah nusantara yang memiliki potensial dengan sumber daya pesisir, lautan, mineral, minyak, dan gas bumi, namun batas dan pengelolaan wilayah laut dan pesisir belum optimal dan merata khususnya pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan bahwa atas maksimal wilayah laut sejauh 12 mil laut, sedangkan batas bagi hasil kelautan kabupaten/kota maksimal sejauh 4 mil, apabila batas wilayah laut antar provinsi tidak mencapai batas maksimal, maka batas akan dibagi sama jarak dengan prinsip garis tengah ( <i>median line</i> ).

## Aspek Hukum dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dalam Perspektif Otonomi Daerah

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	352.14.RAH.a
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Gorontalo Law Review
<b>Pengarang</b>	Rahmat Datau Hairan
<b>Tahun Terbit</b>	2019
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki garis pajang pantai sekitar 81.000 km memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dan diberdayakan. Daerah sebagai wilayah yang berdasarkan Undang-Undang memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya yang ada di wilayah masing-masing. Sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, memberikan kepada daerah untuk dapat melakukan pengelolaan wilayah pesisir karena potensi yang sangat besar.

## Aspek Hukum dan Kelembagaan dalam Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Wilayah Pesisir

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	577.51.GAT.a
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Jurnal Hukum
<b>Pengarang</b>	Gatot Dwi Hendro Wibowo
<b>Tahun Terbit</b>	2009
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi tentang regulasi dan kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir. Mengenai pokok bahasan penelitian ini, penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan hukum.

## Desentralisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Kerangka Prinsip Negara Kepulauan

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	577.51.DHI.d
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Arena Hukum
<b>Pengarang</b>	Dhiana Puspitawati
<b>Tahun Terbit</b>	2014
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Perkembangan pengelolaan wilayah laut dimulai pada saat diadakannya <i>United Nations Conference on Environment and Development</i> (UNCED) pada tahun 1992. UNCED menghasilkan Deklarasi Rio ( <i>Rio Declaration</i> ) berisi tentang prinsip-prinsip pengaturan serta pengelolaan wilayah laut modern, di mana diakui adanya pendekatan baru yang mengedepankan prinsip keterpaduan ( <i>integrated</i> ) dan keberlangsungan ( <i>sustainability</i> ) dalam pengelolaan wilayah laut.

## Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Lampung dalam Rezim Pengelolaan Berbasis Masyarakat

**Kode Klasifikasi DDC**

577.51.MAS.h

**Sektor**

Kelautan dan Perikanan

**Sub-Sektor**

Tata Kelola Laut dan Pesisir

**Penerbit**

Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia

**Pengarang**

Mashuril Anwar  
Maya Shafira

**Tahun Terbit**

2020

**Tipe File**

Jurnal

**Deskripsi**

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir merupakan suatu keniscayaan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan dan menyejahterakan. Konsekuensinya, keserasian antar kebijakan pengelolaan wilayah pesisir terkait keterlibatan masyarakat menjadi penting, guna mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan wilayah pesisir. Oleh karena itu, artikel ini akan menganalisis keserasian antara kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Lampung dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setara, khususnya ketentuan mengenai pelibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir.

## Identifikasi Masalah dan Model Pengelolaan Wilayah Pesisir: Studi Kasus Provinsi DKI Jakarta

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	577.51.DEA.i
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Jurnal Kajian Teknik Sipil
<b>Pengarang</b>	Deasilia Indrasari
<b>Tahun Terbit</b>	2020
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	<p>Kawasan pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut. Kawasan pesisir ini memiliki banyak sekali sumber daya alam, baik sumber daya hayati maupun nonhayati. Kawasan pesisir Jakarta memiliki arti penting, karena ruang pemanfaatan yang multifungsi serta dimanfaatkan oleh berbagai pihak, mengakibatkan kondisi wilayah pesisir Jakarta memiliki permasalahan. Salah satu isu besar yang dihadapi, yaitu abrasi atau erosi pantai. Bila tidak ditangani dengan baik, maka Provinsi DKI Jakarta akan kehilangan sebagian daerah pesisirnya. Penanganan abrasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi harus melibatkan masyarakat sekitar sebagai <i>stakeholder</i> utama di kawasan pesisir.</p>

## Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Laut Nasional terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	333.9.AHM.i
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Journal Lentera Hukum
<b>Pengarang</b>	Ahmad Chaidir Mirza R.A. Rini Anggraini Iwan Rachmad Soetijono
<b>Tahun Terbit</b>	2017
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah berbasiskan kepulauan yang terdiri dari gugusan pulau. Provinsi ini memiliki letak geografis yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Kamboja dan Vietnam. Provinsi Kepulauan Riau berbeda dengan provinsi-provinsi kepulauan lainnya, karena letak provinsi yang dilintasi Selat Malaka.

## **Implikasi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut di Indonesia Berlandaskan *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF)**

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	338.3.IMA.i
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	QISTIE
<b>Pengarang</b>	Imam Subekti
<b>Tahun Terbit</b>	2010
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	<p>Kepentingan negara-negara untuk menguasai sumber daya kelautan merupakan hal yang melatarbelakangi perkembangan pengaturan terhadap laut, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada awalnya kepentingan ini didasari pada kebutuhan negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, dimulai dengan kebutuhan akan sumber daya perikanan dan diikuti dengan minyak dan gas bumi yang melahirkan tuntutan atas laut teritorial dan landas kontinen. Dalam perkembangannya kemudian ternyata bahwa bagian-bagian laut tersebut tidak mencukupi kepentingan negara-negara, sehingga timbul berbagai masalah, antara lain dalam bentuk sengketa perikanan.</p>

***Innovation in Financing Coastal Village Development Through Community-Owned Microfinance Institution: A Case Study of Village Credit Institution (LPD) Kedonganan Bali***  
**(Inovasi Pembiayaan Pembangunan Desa Pesisir Melalui Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Masyarakat: Studi Kasus di Lembaga Pekreditan Desa (LPD) Kedonganan Bali)**

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	332.SUA.i
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan
<b>Pengarang</b>	Suadi Ratih Ineke Wati Nakagawa Mitsuhiro
<b>Tahun Terbit</b>	2019
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Lembaga keuangan mikro (LKM) telah menjadi gerakan yang mendunia. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan faktor-faktor keberhasilan pengelolaan LKM berbasis masyarakat, yaitu LPD (Lembaga Perkreditan Desa), melalui studi kasus di LPD Desa Kedonganan, Kabupaten Badung Bali. Desa ini dipilih karena beberapa alasan antara lain terjadi pergeseran cepat sumber penghidupan masyarakat dari berbasis perikanan (sektor primer) ke pariwisata (sektor tersier), desa mampu mengelola sumber daya milik bersama di pesisir secara baik untuk kegiatan perikanan, tempat wisata, dan kegiatan terkait keagamaan/budaya.

**Kajian Implikasi Terbitnya UU RI. No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Pengelolaan Hutan *Mangrove***  
**(*Study on the Implication of UU RI No 27 Tahun 2007 on Coastal Region and Isles Management on Mangrove Forest Management*)**

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	348.598.ADI.k
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
<b>Pengarang</b>	Aditya Irawan Nilam Sari
<b>Tahun Terbit</b>	2008
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Hutan <i>mangrove</i> pada ekosistem pesisir merupakan zona peralihan antara ekosistem darat dan laut, sehingga kewenangan pengelolaan mengharuskan pendekatan multisektoral/instansi. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengkaji implikasi terbitnya UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaannya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan pengelolaan hutan <i>mangrove</i> .

## **Kebijakan Maritim dalam Mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia**

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	333.9.ARC.k
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Lex Et Societatis
<b>Pengarang</b>	Arcelinocent Emile Pangemanan
<b>Tahun Terbit</b>	2019
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan maritim dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai poros maritim dunia dan bagaimana upaya penegakan hukum untuk menunjang kebijakan maritim dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai poros maritim dunia.

## Kebijakan Pengelolaan Konservasi Kelautan dan Perikanan

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	631.7.RAD.k
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Jurnal Borneo Administrator
<b>Pengarang</b>	Radityo Pramoda Sonny Koeshendrajana
<b>Tahun Terbit</b>	2012
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Sumber daya perikanan yang tersebar di wilayah Indonesia, jika tidak dikelola secara lestari akan punah. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah membuat peraturan yang menetapkan suatu wilayah menjadi kawasan konservasi/dilindungi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan konservasi yang termuat di dalam UU No. 27/2007, PP No. 60/2007, dan UU No. 45/2009. Analisa kajian dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, melalui studi kepustakaan.

## Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut untuk Menunjang Ketahanan Pangan di Indonesia

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	338.3.DEW.k
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik
<b>Pengarang</b>	Dewi Wuryandani Hilma Meilani
<b>Tahun Terbit</b>	2011
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Potensi perikanan di republik ini sangat melimpah di perairan pedalaman dan di laut, namun sampai saat ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat. Peningkatan ekspor hasil perikanan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya standar yang dipersyaratkan, baik untuk hasil perikanan dalam negeri maupun suatu badan yang menginginkan kualitas dan mutu yang terjamin. Beberapa permasalahan klasik yang sering dihadapi bangsa ini antara lain biaya produksi yang masih tinggi, permodalan yang lemah, keterampilan budidaya ikan yang kurang baik, benih yang baik, penyakit pakan, pengelolaan lingkungan dan budidaya masa lalu.

## Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis *Sustainable Development* di Kabupaten Sampang (Studi pada Bappeda Kabupaten Sampang)

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	577.51.DIA.k
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Jurnal Administrasi Publik (JAP)
<b>Pengarang</b>	Dian Marlina Sarwono Mochammad Rozikin
<b>Tahun Terbit</b>	2013
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir berbasis <i>sustainable development</i> di Kabupaten Sampang. Hal ini dikarenakan wilayah pesisir merupakan kawasan yang sangat potensial untuk dikembangkan dan dijaga kelestariannya dengan melakukan pendayagunaan sumber daya pesisir serta pemanfaatan fungsi wilayah secara terencana, rasional, bertanggung jawab, serasi dan seimbang dengan memperhatikan kelestarian lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

## Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu dan Berkelanjutan yang Berbasis Masyarakat

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	577.51.MUH.k
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Jurnal Teknologi
<b>Pengarang</b>	Muhamad Dio Fabianto Pieter Th Berhitsu
<b>Tahun Terbit</b>	2014
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Wilayah pesisir memiliki nilai strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap kerusakan dan perusakan. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan yang bijaksana dengan menempatkan kepentingan ekonomi secara proporsional dengan kepentingan lingkungan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Konsep pengelolaan wilayah pesisir adalah fokus pada karakteristik wilayah dari pesisir itu sendiri, di mana inti dari konsep pengelolaan wilayah adalah kombinasi dari pembangunan adaptif, terintegrasi, lingkungan, ekonomi dan sistem sosial.

## Mencegah “*Tragedy of The Commons*” di Teluk Sawai dengan Sasi pada Era Otonomi Daerah

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	352.14.KAN.m
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Journal of Governance Innovation
<b>Pengarang</b>	Kanyadibya Cendana Prasetyo
<b>Tahun Terbit</b>	2019
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Sejak era otonomi daerah, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya di daerahnya, termasuk sumber daya kelautan dan perikanan. Adanya otonomi daerah juga berimplikasi pada peran serta masyarakat lokal sesuai dengan adat istiadat yang berlaku, termasuk hak ulayat laut yang dikelola adat ( <i>Customary Marine Tenure/CMT</i> ). Praktik-praktik CMT yang ada menunjukkan bahwa CMT dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah perikanan, termasuk mencegah munculnya <i>tragedy of the commons</i> yang mengakibatkan hilangnya spesies ikan.

## Mengembangkan Kawasan Pesisir Kota Semarang sebagai Ruang Publik

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	577.51.MOH.m
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Jurnal Geografi: Media Informasi Pengembangan dan Profesi Kegeografian
<b>Pengarang</b>	Mohammad Agung Ridlo Eppy Yuliani
<b>Tahun Terbit</b>	2018
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Kawasan pesisir Kota Semarang mempunyai luas 5.039,17 ha atau sekitar 0.02 persen dari luas total Kota Semarang (37.366.838 ha). Adapun panjangnya kurang lebih 25 km, antara lain di Kecamatan Tugu sepanjang 3,5 km, Semarang Utara 5,56 km, Semarang Barat 8,94 km dan Genuk 7 km. Aktivitas pada kawasan pesisir ini semakin heterogen, masyarakatnya sebagian bekerja sebagai nelayan dan karena taraf hidupnya di bawah garis kemiskinan, mereka hanya bisa tinggal di permukiman kumuh.

## Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dalam Kerangka Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu di Indonesia

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	577.51.SUB.m
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Jurnal ALAMI: Jurnal Air, Lahan, Lingkungan, dan Mitigasi Bencana
<b>Pengarang</b>	Subandono Diposaptono
<b>Tahun Terbit</b>	2003
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Wilayah pesisir Indonesia yang kaya memiliki berbagai sumber daya yang berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah dan nasional untuk meningkatkan penerimaan devisa, lapangan kerja, dan pendapatan penduduk. Selain kaya akan sumber daya alam, wilayah pesisir juga rentan terhadap tekanan lingkungan dan bencana alam. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan yang sifatnya komprehensif dan terpadu melalui pendekatan pengelolaan pesisir terpadu.

## Model Pengelolaan Terpadu Pembangunan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat di Jawa Tengah

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	577.51.MAS.m
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Hukum dan Dinamika Masyarakat
<b>Pengarang</b>	Mashari Sri Mulyani
<b>Tahun Terbit</b>	2008
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Pembangunan wilayah pesisir dalam rangka memanfaatkan potensi di wilayah tersebut sering tumpang tindih, sehingga tidak jarang aktivitas tersebut menimbulkan masalah bagi upaya pelestarian sumber daya alam pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model pengelolaan terpadu pembangunan wilayah pesisir, yang integratif, koordinasi dan konsistensi program antara pemerintah kabupaten/kota dengan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir yang berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

**Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: *Community Based Development*  
(*Community Based Development: Community-Based Coastal Area Management Model*)**

**Kode Klasifikasi DDC**

577.51.ANA.m

**Sektor**

Kelautan dan Perikanan

**Sub-Sektor**

Tata Kelola Laut dan Pesisir

**Penerbit**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure

**Pengarang**

Anak Agung Istri Ari Atu Dewi

**Tahun Terbit**

2018

**Tipe File**

Jurnal

**Deskripsi**

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan sumber daya laut. Potensi ini tentu dapat dimanfaatkan bagi peningkatan dan percepatan pembangunan ekonomi nasional. Pemanfaatan sumber daya laut secara optimal dan proporsional juga niscaya dapat membantu masyarakat pesisir untuk lepas dari jeratan taraf hidup kemiskinan. Pengelolaan pesisir telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

**Optimisasi Spasial Rasio Lahan dalam Pengelolaan Sumber Data Wilayah Pesisir secara Berkelanjutan Wilayah Studi: Pesisir Selat Madura Jawa Timur**  
*(Spatial Optimization of Land Ratio in Sustainable Coastal Zone Resource Management: Study Location Madura Strait Coastal Zone-East Java Province)*

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	577.51.DWI.o
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	International Journal of Geospatial
<b>Pengarang</b>	Dwi Wisayantono
<b>Tahun Terbit</b>	2014
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Dalam program Agenda 21 Tahun 1992 Bab 17 ataupun UU RI No. 27 Tahun 2007 terdapat pandangan tentang pengelolaan wilayah pesisir dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Perwujudan konsep tersebut diterjemahkan menjadi berbagai bentuk strategi pengelolaan sumber daya pesisir sesuai kategori dan karakteristik unsur negara (pemerintahan, wilayah dan penduduk). Dinamika pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai salah satu negara berkembang masih memiliki persoalan keseimbangan antara sumber daya manusia yang mayoritas petani/nelayan terhadap sumber daya lahan yang semakin terbatas.

## Otoritas Internasional dalam Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Laut Lepas Melalui Forum Regional Fisheries Management Organization (RFMO) dan Implikasi bagi Keanggotaan Indonesia

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	631.7.RAC.o
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Dialogia Iuridica
<b>Pengarang</b>	Rachma Indriyani
<b>Tahun Terbit</b>	2016
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Salah satu masalah klasik yang dihadapi sumber daya perikanan di laut lepas adalah masalah lama diktum “kebebasan laut”, di mana sumber daya perikanan global dianggap bebas ke semua negara. Namun penerapan kebebasan ini telah menjadi semakin berbahaya karena sifat stok ikan yang habis-habisnya telah disadari. Pada tahun 2011, Food and Agriculture Organization (FAO) melaporkan bahwa hanya 15% dari stok ikan laut global diperkirakan kurang tereksploitasi dan sedang dieksploitasi. Dalam situasi yang menantang ini, Regional Fisheries Management Organization (RFMO) muncul sebagai mekanisme di mana Negara-negara yang dapat bekerja sama dalam kepentingan melestarikan dan mengelola sumber daya hayati laut.

## **Pelestarian Lingkungan Laut Melalui Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat oleh Pemerintah Desa/Kelurahan**

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	577.51.ZUN.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)
<b>Pengarang</b>	Zunnuraeni
<b>Tahun Terbit</b>	2018
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa sehingga harus dikembangkan secara optimal. Pengelolaan wilayah pesisir guna mencapai manfaat optimal dapat dilakukan dengan keterlibatan masyarakat.

**Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia**  
*(Regional Development in Coastal and Ocean in Archipelago Perspective of the Republic of Indonesia)*

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	577.51.RID.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Jurnal Ilmiah Platax
<b>Pengarang</b>	Ridwan Lasabuda
<b>Tahun Terbit</b>	2013
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Sebagai negara kepulauan, Indonesia telah diakui dunia secara internasional (UNCLOS 1982) yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang Undang No.17 Tahun 1985. Berdasarkan UNCLOS 1982, total luas wilayah laut Indonesia seluas 5,9 juta km <sup>2</sup> , terdiri atas 3,2 juta km <sup>2</sup> perairan teritorial dan 2,7 km <sup>2</sup> perairan Zona Ekonomi Eksklusif, luas tersebut belum termasuk landas kontinen. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

## Penelitian Lingkungan Pantai Wilayah Pesisir Kabupaten Cirebon, Jawa Barat

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	577.51.PAS.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Jurnal Geologi Kelautan
<b>Pengarang</b>	P. Astjario FX. Harkins
<b>Tahun Terbit</b>	2005
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Sumber daya alam yang tersedia saat ini mengalami penurunan mengingat adanya peningkatan pembangunan yang pesat serta populasi manusia yang terus meningkat. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa sumber daya laut akan menjadi primadona sebagai penunjang perekonomian ke depan. Wilayah pesisir dan laut tampaknya akan dijadikan kawasan yang diprioritaskan untuk pengembangan industri, agrobisnis, agroindustri, pemukiman, pariwisata, transportasi dan pelabuhan. Akan tetapi wilayah ini masih menyimpan beragam permasalahan yang menyebabkan pengembangan dan pengelolaannya menjadi tidak maksimal.

## Pengaturan Wewenang dalam Pengelolaan Wilayah Laut

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	341.4.SHE.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Jurnal Sasi
<b>Pengarang</b>	Sherlock H. Lekipiouw
<b>Tahun Terbit</b>	2014
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Konsep wilayah laut menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan upaya penataan dan penetapan batas-batas pemanfaatan dan pengelolaan wilayah laut dengan memperhatikan konsepsi negara yang bersikukuh pada (1) batas-batas NKRI; dan (2) hak-hak yang terkandung di dalam wilayahnya sendiri.

## Pengelolaan dan Perlindungan Kawasan Pesisir

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	577.51.HAN.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
<b>Pengarang</b>	Handri Jurya Parmi
<b>Tahun Terbit</b>	2019
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Indonesia memiliki banyak potensi seperti potensi kelautan, di mana sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia mengklaim wilayah laut selebar 200 mil, hal ini menambah daerah yurisdiksi Perairan Indonesia sebanyak 2,7 juta km <sup>2</sup> , oleh karena itu tidaklah heran bila negara Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan.

**Pengelolaan Kawasan Pesisir dalam Upaya Pengembangan Wisata Bahari  
(*The Coastal Area Management for the Tourism Development*)**

**Kode Klasifikasi DDC**

577.51.PRA.p

**Sektor**

Kelautan dan Perikanan

**Sub-Sektor**

Tata Kelola Laut dan Pesisir

**Penerbit**

Oseana

**Pengarang**

Pramudji

**Tahun Terbit**

2002

**Tipe File**

Jurnal

**Deskripsi**

Pengembangan pariwisata pesisir harus disusun dalam kerangka kerja rencana pembangunan sosioekonomi nasional, regional, dan lokal untuk memastikan integrasi yang tepat dari tujuan lingkungan dalam strategi pembangunan. Secara khusus, pengembangan pariwisata pesisir harus didekati dalam strategi nasional untuk pengembangan dan pengelolaan kawasan pesisir, dengan akan mengidentifikasi zona yang paling cocok untuk pariwisata. Kawasan pesisir yang disediakan untuk pengembangan pariwisata harus dicakup oleh rencana zonasi dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan sosioekonomi alam daerah tersebut.

## Pengelolaan Potensi Laut Indonesia dalam Spirit Ekonomi Islam (Studi terhadap Eksplorasi Potensi Hasil Laut Indonesia)

**Kode Klasifikasi DDC**

2X6.3.SUK.p

**Sektor**

Kelautan dan Perikanan

**Sub-Sektor**

Tata Kelola Laut dan Pesisir

**Penerbit**

MALIA: Jurnal Ekonomi Islam

**Pengarang**

Sukamto

**Tahun Terbit**

2017

**Tipe File**

Jurnal

**Deskripsi**

Tulisan ini mencoba menyikapi potensi kekayaan laut Indonesia dan pengelolaannya dalam perspektif spirit ekonomi Islam. Kekayaan flora, fauna, hayati, dan nabati laut Indonesia merupakan harta tersimpan yang selama beberapa dekade ini belum diberdayakan secara optimal untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 70 persen laut dan 30 persen daratan, Indonesia mempunyai potensi kelautan dan kemaritiman yang sangat besar. Posisi Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa yang merupakan pertemuan arus panas dan dingin, menyebabkan sumber daya hayati kelautan Indonesia begitu beraneka ragam.

## Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir dan Lautan Seiring dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	352.14.ROK.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan
<b>Pengarang</b>	Rokhimin Dahuri
<b>Tahun Terbit</b>	2001
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah lautan meliputi hampir dua pertiga bagian dari seluruh luas wilayah nusantara yang potensial dengan sumber daya pesisir dan lautan berupa sumber daya perikanan, <i>mangrove</i> , terumbu karang, padang lamun, sumber daya mineral minyak bumi dan gas alam termasuk bahan tambang lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Sejauh ini, pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan kelautan masih jauh dari optimal, dan seiring dengan berlakunya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka peran daerah dalam pengelolaan pembangunan di sektor kelautan akan menjadi besar.

**Pengelolaan Wilayah Laut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Prinsip-Prinsip *Good Environmental Governance***

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	341.4.WIL.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Media Luris
<b>Pengarang</b>	Wilda Prihatiningtyas
<b>Tahun Terbit</b>	2019
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Berdasarkan Pasal 25 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) disebutkan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang". Konsekuensi logis dari bentuk negara yang bercirikan kepulauan tersebut yaitu luasnya wilayah lautan. Hal tersebut didukung dengan fakta empiris yang menunjukkan bahwa 70% dari wilayah Indonesia adalah berupa laut.

## Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia dalam Rangka Pembangunan Berbasis Pelestarian Lingkungan

**Kode Klasifikasi DDC**

577.51.TOM.p

**Sektor**

Kelautan dan Perikanan

**Sub-Sektor**

Tata Kelola Laut dan Pesisir

**Penerbit**

Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan

**Pengarang**

Tommy Cahya Trinanda

**Tahun Terbit**

2017

**Tipe File**

Jurnal

**Deskripsi**

Indonesia merupakan negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Namun dengan panjang garis pantai tersebut, pengelolaan wilayah pesisir belum optimal dan merata. Dari potensi sumber data yang ada baru sekira 55 persen dimanfaatkan. Kegiatan pembangunan segala bidang di wilayah pesisir masih memarjinalkan masyarakat lokal yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan tradisional dan masih mengesampingkan aspek pelestarian ekosistem dan habitat asli. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran ideal mengenai pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis pelestarian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis yuridis normatif.

## Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu: Solusi Pemanfaatan Ruang, Pemanfaatan Sumber Daya dan Pemanfaatan Kapasitas Asimilasi Wilayah Pesisir yang Optimal dan Berkelanjutan

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	577.51.MAH.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Jurnal Kelautan
<b>Pengarang</b>	Mahfud Effendy
<b>Tahun Terbit</b>	2009
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	<p>Peranan sumber daya pesisir diperkirakan akan semakin meningkat di masa-masa mendatang dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional, regional, maupun lokal. Sehingga, untuk dapat memanfaatkan ruang dan sumber daya wilayah pesisir secara optimal dan berkelanjutan, perlu pemahaman yang mendalam tentang pengertian dan karakteristik dari kawasan ini serta masyarakat yang mendiaminya. Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu memiliki pengertian bahwa pengelolaan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan pesisir dilakukan melalui penilaian menyeluruh (<i>comprehensive assesment</i>), menentukan tujuan dan sasaran pemanfaatan, dan kemudian merencanakan serta mengelola segenap kegiatan pemanfaatannya.</p>

**Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemulihan Ekosistem dan Pengembangan Kelembagaan Partisipatif di Wilayah Pesisir Desa Rugemuk dan Bagan Serdang, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang**

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	577.51.YUS.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Jurnal Prodikmas Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
<b>Pengarang</b>	Yusak Maryunianta T. Riza Zarzani
<b>Tahun Terbit</b>	2017
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Kemiskinan di pesisir disebabkan oleh berbagai faktor kompleks yang saling terkait serta merupakan sumber utama yang melemahkan akses kelompok masyarakat pesisir terhadap sumber daya. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan kawasan pesisir. Secara umum, kemiskinan nelayan bersifat struktural dan merupakan residu pembangunan kelautan dan perikanan selama ini.

**Peran Masyarakat Pesisir terhadap Pengelolaan Terumbu Karang di Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh**  
*(The Role of Coastal Communities on Coral Reef Management in Area of Eastern Coastal Water Conservation Weh Island)*

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	551.42.NUR.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Jurnal Perikanan Tropis
<b>Pengarang</b>	Nurul Najmi Mai Suriani Mira Mauliza Rahmi dkk.
<b>Tahun Terbit</b>	2020
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Peran masyarakat pesisir dalam pelestarian terumbu karang merupakan hal yang penting untuk mendukung pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan. Artikel ini membahas tentang peranan masyarakat pesisir dalam pengelolaan terumbu karang di perairan kawasan konservasi dan tingkat pengetahuan masyarakat pesisir tentang pentingnya menjaga ekosistem pesisir. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mendistribusikan kuesioner, wawancara langsung dan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dan hasilnya adalah diuraikan berdasarkan analisis deskriptif.

**Peran Sektor Perikanan pada Wilayah Pesisir Perbatasan Kalimantan Barat  
(*The Role of Fisheries Sector in the Coastal Border Areas of West Borneo*)**

**Kode Klasifikasi DDC**

338.3.MAU.p

**Sektor**

Kelautan dan Perikanan

**Sub-Sektor**

Tata Kelola Laut dan Pesisir

**Penerbit**

Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

**Pengarang**

Maulana Firdaus  
Rikrik Rahadian

**Tahun Terbit**

2018

**Tipe File**

Jurnal

**Deskripsi**

Pembangunan wilayah pesisir perbatasan menjadi sebuah tantangan besar karena selalu identik dengan ketertinggalan. Sektor perikanan dianggap telah teruji dan mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan sektor perikanan di wilayah perbatasan (Kalimantan Barat) Indonesia khususnya yang ada di Kabupaten Sambas. Pendekatan kebutuhan minimum dan analisis "*location quotient*" digunakan dalam penelitian ini.

## Perencanaan Strategis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Terpadu di Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan Seribu Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	577.51.SIT.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Buletin Ekonomi Perikanan
<b>Pengarang</b>	Siti Amanah
<b>Tahun Terbit</b>	2004
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	<p>Pengelolaan pesisir terpadu ditujukan untuk mengatasi dan mencegah kerusakan sumber daya, memastikan koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam eksploitasi sumber daya dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun, pendekatan itu tidak dapat dilakukan tanpa visi yang baik, misi dan tujuan yang jelas, serta penetapan program yang memperhatikan kepentingan dan kebutuhan pemangku kepentingan. Pulau Seribu sebagai bagian dari wilayah Jakarta telah mengalami eksploitasi berlebihan dan terlalu banyak pemangku kepentingan mengambil manfaat dari sumber daya.</p>

## Prinsip Harmonisasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut di Daerah Kepulauan Indonesia

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	333.9.MRI.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Tahkim
<b>Pengarang</b>	M. Ridwan
<b>Tahun Terbit</b>	2017
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Sumber daya Indonesia pada hakikatnya bersumber dari sektor maritim yang dapat dikembangkan dengan baik sehingga dapat membantu daerah untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial dan politik. Pengembangan dari sektor maritim juga dapat menyumbangkan integritas perekonomian, melalui peningkatan sektor produksi, industri, jasa, dan swasembada di bidang maritim.

**Revitalisasi Lembaga Adat Pengelolaan Sumber Daya Laut untuk Membangun Kembali Budaya Bahari**  
*(Revitalization of Indigenous Institution of Marine Resource Management to Rebuilding a Culture of Marine)*

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	306.RAT.r
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Jurnal Kebudayaan
<b>Pengarang</b>	Ratna Indrawasih
<b>Tahun Terbit</b>	2017
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Keberadaan kearifan lokal saat ini menghadapi tantangan dan ancaman degradasi, bahkan menuju kepunahan. Seperti kearifan lokal terkait pengelolaan sumber daya laut di Maluku Tengah dan Buton yang sarat dengan budaya bahari. Artikel ini membahas apa yang terjadi dengan kearifan lokal di Buton, khususnya di Desa Wasuemba, Kecamatan Wabula, terkait terhadap pengelolaan sumber daya laut, mengapa perlu dilakukan revitalisasi kelembagaan adat.

**Strategi Pengelolaan Berkelanjutan Pesisir dan Laut Pulau Nusa Manu dan Pulau Nusa Leun di Kabupaten Maluku Tengah**  
*(Sustainable Coastal and Marine Management Strategies of Nusa Manu and Nusa Leun Islands in Central Maluku Regency)*

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	577.51.ILH.s
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Journal of Regional and Rural Development Planning
<b>Pengarang</b>	Ilham Marasabessy Achmad Fahrudin Zulhamsyah Imran dkk.
<b>Tahun Terbit</b>	2018
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Pesisir dan pulau-pulau kecil (PPK) dihadapkan pada berbagai tantangan yang signifikan. Wilayah ini memiliki kecenderungan sangat besar untuk mengalami kerusakan habitat, perubahan pada proses alami ekosistem, dan pencemaran. Wilayah pesisir dan PPK semakin kompleks seiring terjadinya konflik kepentingan secara internal dalam masyarakat dan pada tingkatan pemerintahan. Oleh karena itu, aktivitas yang akan ditempatkan pada suatu ruang dalam wilayah ini harus memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan kawasan dalam menyediakan sumber daya.

## Strategi Pengelolaan Kawasan Pesisir Kabupaten Merauke (Studi Kasus di Wilayah Pesisir Kawasan Ndalir, Kawasan Payumb dan Kawasan Lampu Satu, Distrik Merauke Kabupaten Merauke)

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	577.51.IRB.s
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Jurnal Agricola
<b>Pengarang</b>	Irba Djaja
<b>Tahun Terbit</b>	2011
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kondisi wilayah pesisir Kabupaten Merauke, dan (2) menyusun strategi pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Merauke. Penelitian ini dilakukan di wilayah pesisir Kabupaten Merauke. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi langsung, wawancara, dan kuesioner, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan diperoleh dari instansi terkait, pemerintah, dan instansi terkait. Data pendukung berupa grafik, kondisi umum lokasi penelitian, cuaca, dan lain-lain.

## Tata Kelola Kelautan berdasarkan *Integrated Coastal and Ocean Management* untuk Pembangunan Kelautan Berkelanjutan

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	333.9.DIN.t
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Perspektif
<b>Pengarang</b>	Dina Sunyowati
<b>Tahun Terbit</b>	2010
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	<p>Pembangunan kelautan pada dasarnya harus memperhatikan lingkungan laut secara keseluruhan, termasuk wilayah pesisir, karena lingkungan laut yang menjadi komponen penting dalam mendukung kehidupan sistem global dan aset positif dirinya untuk kesempatan oleh pembangunan berkelanjutan. Pembangunan kelautan berkelanjutan, diimbangi pembangunan ekonomi dan lingkungan yang mendukung kapabilitas baik di pantai atau di laut, berdasarkan Agenda 21 Bab 17. Kebijakan laut nasional meliputi 2 (dua) dimensi kepentingan nasional dan otoritas kedaulatan dan yuridiksi, dan bunga Indonesia dan keterlibatan pada peraturan global dalam hukum internasional.</p>

## Tata Kelola Sumber Daya Perikanan dan Kelautan sebagai Penggerak Ekonomi Wilayah Propinsi Riau

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	338.3.NAN.t
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Jurnal Ilmu Ekonomi & Pembangunan (JIEP)
<b>Pengarang</b>	Nandang Najmulmunir
<b>Tahun Terbit</b>	2011
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Sumber daya alam merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Salah satunya adalah sumber daya kelautan dan perikanan. Keduanya akan memberikan keunggulan komparatif bagi daerah di mana sumber daya tersebut berada. Ada dua kabupaten daerah dari 11 kabupaten dan kota di Provinsi Riau, yang mana perikanan dan kelautan menjadi sektor berbasis ekonomi.

**Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai Salah Satu Dokumen Penting untuk Disusun oleh Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota**

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	341.4.SUP.z
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Jurnal Mangrove dan Pesisir
<b>Pengarang</b>	Suparno
<b>Tahun Terbit</b>	2009
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Rencana zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya masing-masing unit perencanaan disertai dengan adopsi struktur perencanaan dan pola ruang di wilayah yang mencakup kegiatan perencanaan yang dapat dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin. Pemerintah daerah diminta untuk menyusun rencana zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Alokasi ruang dalam rencana zonasi terdiri dari Rencana Penggunaan Kawasan Publik, Rencana Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Rencana Khusus dan Penetapan Rencana dan Wilayah selanjutnya dibagi menjadi zona dan sub-zona.

# LAPORAN

## Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	577.51.AGU.k
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Sekretaris Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP
<b>Pengarang</b>	Agus Dermawan
<b>Tahun Terbit</b>	-
<b>Tipe File</b>	Laporan
<b>Deskripsi</b>	Laut adalah masa depan bangsa. Berdasarkan Trisakti dan Nawa Cita visi KKP adalah mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional. Misi KKP adalah kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan. Pada tahun 2019 12% PDB perikanan didapatkan dari produksi, ekspor, konsumsi ikan dan pendapatan.

## Kelembagaan dalam Kerangka Kelautan/Kemaritiman

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	354.5.KEM.k
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
<b>Pengarang</b>	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
<b>Tahun Terbit</b>	2014
<b>Tipe File</b>	Laporan
<b>Deskripsi</b>	Isu penanganan urusan kelautan: 1). Penetapan garis batas wilayah teritorial laut Indonesia dengan negara tetangga; 2). Pengawasan dan keamanan laut; 3). Daya saing pengelolaan dan pemanfaatan hasil laut dengan negara lain; 4). Kesenjangan ekonomi antara daratan utama dan pulau-pulau kecil dan 5). Dampak perubahan iklim.

## Kerangka Hukum dan Tata Lembaga dalam Sektor Perikanan di Indonesia

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	338.3.PUS.k
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia
<b>Pengarang</b>	Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Yayasan Baruna Nusantara Lubis Ganie Surowidjojo Law Firm (LGS) dkk.
<b>Tahun Terbit</b>	2019
<b>Tipe File</b>	Laporan
<b>Deskripsi</b>	Indonesia adalah negara kepulauan penting yang memiliki keanekaragaman hayati laut yang signifikan secara global dan sangat bergantung pada makanan laut untuk kelangsungan hidup manusia dan perkembangan ekonomi. Namun demikian, sektor perikanan ini dapat dipengaruhi oleh penangkapan ikan yang berlebihan, masalah pengelolaan, dan berbagai tantangan institusi, tata kelola, maupun ekonomi.

## Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	577.51.LUK.a
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
<b>Pengarang</b>	Luky Adrianto
<b>Tahun Terbit</b>	2015
<b>Tipe File</b>	Laporan
<b>Deskripsi</b>	Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia yang terdiri dari 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km <sup>2</sup> yang terdiri dari 2,01 juta km <sup>2</sup> daratan, 3,25 juta km <sup>2</sup> lautan, dan 2,55 juta km <sup>2</sup> Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Mengingat luas wilayah laut Indonesia lebih luas dari wilayah daratan, menjadikan sumber daya pesisir dan lautan memiliki potensi yang sangat penting, karena di wilayah pesisir dan lautan menyediakan berbagai sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati yang bernilai ekonomis dan ekologis yang tinggi.

## Laporan Hasil Kajian Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumber Daya Kelautan

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	333.9.DIR.I
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
<b>Pengarang</b>	Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
<b>Tahun Terbit</b>	2014
<b>Tipe File</b>	Laporan
<b>Deskripsi</b>	Posisi geografis Indonesia yang berada di antara benua Asia dan Afrika serta antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, telah disadari oleh pendiri bangsa ini sejak awal. Undang-Undang Dasar 1945 telah menyebutkan secara jelas bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang berciri nusantara. Sebagai negara kepulauan, hak-hak Indonesia diakui secara luas oleh komunitas internasional, bukan hanya pada kedaulatan atas wilayah teritorial akan tetapi juga hak berdaulat atas pengelolaan sumber daya yang ada di dalamnya.

## Pengelolaan Ruang Laut

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	333.9.AGU.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Kementerian Kelautan dan Perikanan
<b>Pengarang</b>	Agus Dermawan
<b>Tahun Terbit</b>	2017
<b>Tipe File</b>	Laporan
<b>Deskripsi</b>	Potensi Indonesia sebagai negara maritim: 1). Indonesia merupakan negara kelautan terbesar dengan bentang laut luas dan ribuan pulau besar dan kecil; 2). Posisi geografis laut Indonesia terletak di antara persilangan dua benua dan dua samudera sekaligus memiliki perairan yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan internasional dan 3). Laut Indonesia memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang potensial.

**Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Melalui Pemberdayaan Kearifan Lokal di Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur**  
***(Coastal Resources Management and Sea by Empowering the Communal Wisdom in Lembata Regency, East Nusa Tenggara Province)***

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	577.51.STE.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Dissertation Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
<b>Pengarang</b>	Stefanus Stanis
<b>Tahun Terbit</b>	2005
<b>Tipe File</b>	Laporan
<b>Deskripsi</b>	Sumber daya pesisir dan laut dewasa ini mengalami degradasi sebagai akibat dari perilaku pemanfaatan yang tidak ramah lingkungan. Pemanfaatan cenderung bersifat destruktif dan merusak, serta tidak mempertimbangkan aspek konservasi dan keberlanjutan sumber daya. Masyarakat memegang peranan penting, karena itu pengelolaan dengan berbasis pemberdayaan sumber daya lokal. Tradisi dan hukum adat yang mempunyai kaitan dan bermanfaat terhadap upaya pengelolaan sumber daya pesisir dan laut di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik pengambilan sampel secara <i>purposive</i> pada narasumber dan tokoh-tokoh kunci.

## Tata Kelola Kelautan dan Perikanan

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	338.3.MAX.t
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Suara Karya
<b>Pengarang</b>	Max Tehusalawany
<b>Tahun Terbit</b>	2010
<b>Tipe File</b>	Laporan
<b>Deskripsi</b>	Sebagai negara bahari atau kepulauan, Indonesia termasuk negara di kawasan Asia-Pasifik dengan tingkat konsumsi produk perikanan terbesar di dunia. Data Food and Agriculture Organization (FAO) 2006 menunjukkan sekitar 87% pelaku usaha sektor perikanan berada di kawasan Asia. Sayangnya kekayaan dan potensi sumber daya kelautan dan keanekaragaman hayati ( <i>biodiversity</i> ) yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Program revitalisasi perikanan sudah dicanangkan sejak awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Program ini memiliki target meningkatkan daya saing produk perikanan menuju pembangunan perikanan secara optimal dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

# **RINGKASAN KAJIAN**

## Hukum Pesisir di Indonesia (Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	577.51.DEN.h
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratungi
<b>Pengarang</b>	Denny B.A. Karwur
<b>Tahun Terbit</b>	2019
<b>Tipe File</b>	Ringkasan Kajian
<b>Deskripsi</b>	Wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan ( <i>interface</i> ) antara ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya (Clark 1996). Kekayaan sumber daya tersebut menimbulkan daya tarik bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan sumber dayanya dan berbagai instansi untuk meregulasi pemanfaatannya (Putra 2001).

## Intervensi Pengembangan Masyarakat Melalui Model Pengelolaan Pesisir Karangsong Kabupaten Indramayu

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	577.51.SIT.i
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Proceeding International Conference on Social Work (ICSW)
<b>Pengarang</b>	Sitti Faoziyah
<b>Tahun Terbit</b>	2020
<b>Tipe File</b>	Ringkasan Kajian
<b>Deskripsi</b>	<p>Kehidupan masyarakat pesisir seringkali dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi, salah satu penyebabnya karena peristiwa alam yang berdampak adanya kerusakan wilayah pesisir itu sendiri. Penelitian ini menganalisis intervensi pengembangan masyarakat di pesisir Karangsong, model pengelolaan pesisir dalam pelestarian dan pemanfaatan <i>mangrove</i>, potensi jaringan sumber dalam komunitas pengelola hutan <i>mangrove</i>. Metode penelitian yang digunakan adalah <i>mix method</i>. Data dikumpulkan melalui <i>survey</i>, wawancara dan observasi. Analisis data kuantitatif secara uji korelasi dan kualitatif secara interpretif melalui pengelompokan data, <i>coding</i>, reduksi, penampilan data dan penarikan kesimpulan.</p>

## Kerangka Kerja Sama dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	333.9.ARI.k
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Direktorat Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah Bappenas
<b>Pengarang</b>	Arifin Rudyanto
<b>Tahun Terbit</b>	2004
<b>Tipe File</b>	Ringkasan Kajian
<b>Deskripsi</b>	Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.504 pulau dengan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 km. Di sepanjang garis pantai ini terdapat wilayah pesisir yang relatif sempit tetapi memiliki potensi sumber daya alam hayati dan non-hayati; sumber daya buatan; serta jasa lingkungan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Potensi-potensi tersebut perlu dikelola secara terpadu agar dimanfaatkan secara berkelanjutan. Wilayah pesisir secara ekologis merupakan daerah pertemuan antara ekosistem darat dan laut. Ke arah darat meliputi bagian tanah, baik yang kering maupun yang terendam air laut, dan masih dipengaruhi oleh sifat-sifat fisik laut seperti pasang surut, ombak dan gelombang serta perembesan air laut.

## Membangun Tata Kelola & Kelembagaan Kawasan Konservasi Perairan: Pembelajaran dari Taman Nasional Perairan Laut Sawu

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	631.7.KEM.m
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Kementerian Kelautan dan Perikanan, MPAG dan USAID
<b>Pengarang</b>	Kementerian Kelautan dan Perikanan, MPAG dan USAID
<b>Tahun Terbit</b>	2020
<b>Tipe File</b>	Ringkasan Kajian
<b>Deskripsi</b>	Upaya membangun tata kelola sebuah kawasan konservasi perairan merupakan faktor penting untuk mencapai pengelolaan yang efektif berdasarkan EKKP3K. Taman Nasional Perairan Laut Sawu sebagai salah satu kawasan konservasi perairan mengalami proses membangun tata kelola ini dalam rentang waktu yang cukup panjang. Dokumentasi pembelajaran proses membangun tata kelola di Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu merupakan upaya untuk berbagi pengalaman dengan kawasan konservasi perairan lainnya.

## Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut dalam Kerangka Pembangunan Perekonomian Daerah

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	577.51.TAT.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Makalah Seminar Sosialisasi Nasional Program MFCDP
<b>Pengarang</b>	Tatag Wiranto
<b>Tahun Terbit</b>	2004
<b>Tipe File</b>	Ringkasan Kajian
<b>Deskripsi</b>	Pembangunan di Indonesia di masa yang lalu ternyata sering kali berpijak pada paradigma pembangunan yang menekankan pada efisiensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara agregat. Paradigma yang dikembangkan dari pemikiran Kuznet (1966) tersebut menyatakan bahwa bagi negara sedang berkembang yang pendapatan rendah dapat tumbuh perekonomiannya, dengan cara terlebih dahulu mengorbankan aspek pemerataannya ( <i>trade off</i> ).

## Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut di Indonesia

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	338.3.SOB.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Universitas Indonesia
<b>Pengarang</b>	Sobirin
<b>Tahun Terbit</b>	1999
<b>Tipe File</b>	Ringkasan Kajian
<b>Deskripsi</b>	Negara Republik Indonesia yang secara geografis merupakan negara kepulauan di daerah tropis dan terletak di antar Lautan Pasifik dan Lautan Indonesia, sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan (laut) yang relatif hangat airnya dan dilalui hembusan angin monson. Secara biologis perairan indonesia merupakan habitat yang sangat baik bagi perkembangbiakan biota laut, sehingga memiliki kelimpahan dan keanekaragaman hayati biota laut sangat tinggi, yang pada gilirannya mengakibatkan potensi sumber daya perikanan laut di Indonesia paling tinggi di dunia (Bailey, 1987).

## Pentingnya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	577.51.KUS.p
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	Universitas Terbuka
<b>Pengarang</b>	Kusumastanto T.
<b>Tahun Terbit</b>	2012
<b>Tipe File</b>	Ringkasan Kajian
<b>Deskripsi</b>	Wilayah pesisir dan laut memiliki arti yang strategis dan penting bagi masa depan Indonesia mengingat sebagai negara Kepulauan ( <i>archipelagic state</i> ) terbesar di dunia. Wilayah ini mendominasi total wilayah Indonesia. Panjang pantai Indonesia adalah 81.000 km, terpanjang kedua setelah Kanada atau yang pertama di dunia dalam konteks panjang pantai yang produktif (catatan: panjang pantai Kanada didominasi oleh panjang pantai wilayah Greenland yang berupa lahan kurang produktif karena berupa gurun).

## Strategi Kelautan Indonesia 2014 - 2021

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	333.9.THE.s
<b>Sektor</b>	Kelautan dan Perikanan
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Kelola Laut dan Pesisir
<b>Penerbit</b>	The David & Lucile Packard Foundation
<b>Pengarang</b>	The David and Lucile Packard Foundation
<b>Tahun Terbit</b>	2018
<b>Tipe File</b>	Ringkasan Kajian
<b>Deskripsi</b>	Selama lebih dari 50 tahun, Yayasan David dan Lucile Packard telah berinvestasi untuk memperluas pemahaman mengenai kelautan dan telah bekerja dengan mitra di seluruh dunia untuk melindungi serta memulihkan kehidupan laut. Dibimbing oleh ilmu pengetahuan yang terinspirasi oleh kecerdasan manusia, kami berinvestasi di berbagai negara dan dalam strategi global yang mendukung perbaikan kelestarian laut. Yayasan Packard telah berinvestasi di berbagai upaya konservasi kelautan dan pengelolaan perikanan di Indonesia selama hampir 20 tahun. Berbagai inisiatif kami termasuk dukungan untuk memastikan bahwa perikanan laut dan budi daya perikanan (akuakultur) lestari dan memiliki tata kelola yang baik.



*Kementerian PPN/  
Bappenas*